**Ringkasan Penelitian**

**PERAN AL-MAWALI PERSIA DAN TURKI DALAM KEMAJUAN DAN KEMUNDURAN PERADABAN ISLAM MASA DAULAH ABBASIYAH**

**Oleh : Dr. Nurul Hak, M.Hum**

A. Pendahuluan

Sejarah dan peradaban Islam senantiasa melibatkan etnis dalam setiap tahapan kemunculan, perkembangan, kemajuan hingga kemundurannya. Artinya sepanjang sejarahnya, dari masa klasik sampai masa modern, peradaban Islam tidak terlepas dari peran etnis di dalamnya, baik etnis Arab maupun non Arab. Etnis dalam makna semantiknya dapat mengacu kepada suku, kabilah, klan atau komunitas sosial yang diikat oleh kesamaan-kesamaan priomordial; kesamaan keturunan atau *genealogy* (berasal dari darah yang sama) dan kesamaan geografis (wilayah). Secara operasional, etnis juga bermakna suatu entitas kebangsaan, perwujudan dari kesamaan primordial di atas.[[1]](#footnote-1)

Selain etnis Arab, pada kenyataannya etnis non Arab juga ikut berperan secara signifikan dalam proses peradaban Islam tersebut. Bahkan menurut Ibn Khaldun, meskipun pada awal kemunculan dan perkembangannya peradaban Islam itu berada di Jazirah Arab, namun bangsa yang lebih banyak perperan dalam proses perkembangan dan kemajuan peradaban tersebut adalah etnis non Arab. Etnis non Arab ini dalam sejarah dan peradaban Islam dikenal dengan al-mawali, khususnya etnis non Arab yang menganut agama Islam. Di antara al-mawali yang berperan dalam proses peradaban tersebut adalah etnis Persia, Turki, Afrika dan yang lainnya.

Pada masa Daulah Abbasiyah, peran al-mawali sangat signifikan.[[2]](#footnote-2) Bahkan berkat kontribusi dan peran signifikan etnis al-mawali, masa daulah ini dalam sejarah dan peradaban Islam sering disebut sebagai masa puncak kegemilangan peradaban Islam dan masa keemasan (*the golden age*).[[3]](#footnote-3) Masa Khalifah al-Ma’mun merupakan masa puncak peradaban Islam, khususnya dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga memberikan pengaruh konstruktif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan awal abad pertengahan dalam dunia Islam dan dalam dunia Barat Modern secara umum.[[4]](#footnote-4)

Daulah Abbasiyah,sejak masa awal kemunculannya masa Khalifah al-Saffah pada tahun 132 H./750 M. hingga masa awal kemundurannya sejak masa al-Mutawakkil pada tahun 232 H./837 M., selalu melibatkan al-mawali, khususnya al-Mawali Persia dan Turki.[[5]](#footnote-5) Daulah ‘Abbasiyah pada periode pertama pemerintahannya mengangkat al-mawali Persia dan Khurasan dalam pos-pos kementerian dan perdana menteri[[6]](#footnote-6) sebagai pejabat teras dalam pemerintahannya. Sementara, periode kedua daulah tersebut, sejak masa Khalifah al-Mutawakkil hingga masa Khalifah al-Mustakfi peranan birokratis pemerintahan banyak didominasi oleh etnis Turki, hingga masa kemundurannya.

Hal yang menarik untuk dikaji adalah bahwa peranan kedua al-mawali tersebut mengakibatkan dua kondisi pemerintahan Daulah Abbasiyah yang kontras; kemajuan dan kemunduran. Keterlibatan dan peran sosio-politik etnis Persia pada periode pertama telah mendorong daulah ini pada perkembangan dan kemajuannya, sedangkan keterlibatan dan peranan etnis Turki pada periode kedua daulah ini justru telah mendorong kemunduran daulah ini, yang pada gilirannya mengakibatkan melemahnya kekuatan politik pada masa daulah tersebut.[[7]](#footnote-7)

Signifikansi kajian ini bukan terletak pada penekanan etnisistasnya tetapi lebih pada proses sejarah dan peranan yang dimainkan oleh kedua etnis al-mawali tersebut dalam sejarah dan peradaban Islam. Di samping itu, dinamika peradabannya yang dapat mengangkat peradaban Islam menjadi bagian dari peradaban dunia yang berpengaruh hingga masa modern.

Secara lebih spesifik, kajian ini akan menganalisis bagaimana peran- peran yang dimainkan al-mawali Persia dan Turki dalam periode pertama dan kedua dari Daulah Abbasiyah sehingga menimbulkan perkembangan dan kemajuan di satu sisi dan kelemahan serta kemunduran di sisi lain. Kepentingan itu juga untuk mengetahui hubungan antara peran kedua etnis tersebut dengan faktor kemajuan dan kemunduran pada masa daulah tersebut. Kemajuan peradaban Islam masa Daulah ‘Abbasiyah telah menjadi masa kegemilangan umat Islam sepanjang sejarah yang telah berpengaruh bukan saja terhadap peradaban Islam, tetapi juga terhadap dunia Barat (Eropa) modern.[[8]](#footnote-8)

Dari sisi analisis dan pemahaman sejarah, kajian terhadap peran kedua etnis tersebut dalam kaitannya dengan kemajuan dan kemunduran Daulah ‘Abbasiyah juga dianggap penting untuk menunjukkan keunikan dan determinisme sejarah, khususnya sejarah Islam, sehingga tidak terjadi generalisasi dalam memahami fakta-fakta masa lalu dalam konteks sejarah dan peradaban Islam.

Berangkat dari pemaparan di atas, ada tiga permasalahan yang relevan untuk dikaji mengenai kedua al-Mawali di atas. Pertama, mengenai peran-peran sosial-politik dimainkan oleh al-mawali Persia dan etnis Turki dalam mendorong ke arah kemajuan dan kemunduran Daulah ‘Abbasiyah. Kadua, mengenai alasan (argumen) atas Daulah ‘Abbasiyah yang mengalami kemajuan ketika pemerintahannya dikendalikan oleh al-Mawali Persia dan mengalami kemunduran ketika dikendalikan oleh al-Mawali Turki. Ketiga, faktor-faktor yang menyebabkan dua kondisi yang berbeda (kontras) tersebut. Permasalahan kedua dan ketiga sangat berkaitan erat dan saling berhubungan.

Untuk mengkaji ketiga permasalahan tersebut, penulis akan membatasi kajian ini, baik dari sisi masa maupun ruang (spasial). Daulah ‘Abbasiyah dalam penelitian ini mencakup masa pemerintahan Daulah Abbasiyah periode pertama, sejak masa Khalifah Abu al-Abbas as-Saffah hingga Khalifah al-Mutawakkil ditandai oleh dominasi al-mawli Persia (132 H./750 M. – 247 H./861 M.). Sedangkan periode kedua akan lebih dibatasi lagi, yaitu dari mulai Khalifah al-Mu’tashim sampai Khalifah al-Mustakfi ( 247 H./861 M – 334 H./ 861 M. – 945 M.), khalifah ke-22 dari para Khalifah Daulah Abbasiyah.[[9]](#footnote-9) Dengan demikian, tidak keseluruhan masa Daulah Abbasiyah dibahas dalam kajian ini.

Sementara dari sisi spasial (ruang), kajian ini secara spesifik membahas tentang Daulah Abbasiyah di Baghdad (Iraq) ketika al-mawali Persia mendominasi dan mengendalikan pemerintahan Daulah Abbasiyah. Selain Baghdad, wilayah Iraq yang lain, yaitu Samarra juga menjadi bagian dari spasial yang dikaji. Karena ketika Daulah Abbasiyah dikendalikan al-Mawali Turki, wilayah kekuasaannya berpusat di Samarra.

Untuk mengkaji peran al-Mawali al-Mawali Persia dan Turki, selain pendekatan sejarah yang diakronis,[[10]](#footnote-10) juga bersifat kronologis, mengungkapkan fakta-fakta masa lalu berdasarkan urutan waktu kejadian atau peristiwanya, kemudian menyusunnya dalam sebuah konstruksi sejarah. Dari perspektif historis dapat dikaji aspek kronologis dan diakronisnya, mencakup awal keterlibatan al-mawali Persia, hubungan mereka dengan bangsa Arab sebelumnya, seperti pada masa Daulah Bani Umayyah, dan hubungan mereka dengan Daulah Abbasiyah sebagai pengganti Daulah Bani Umayyah. Perspektif sejarah dalam konteks ini bukan hanya masalah peristiwa masa lalu, tetapi juga secara analisis mengenai keberlanjutan (*continuity*) dan perubahan (*change*) dalam proses sejarahnya. Dalam konteks empiris sejarah Islam klasik, ia berarti memahami kedua etnis tersebut sebelum peradaban Islam muncul.

Kajian ini juga menganggap penting teori strukturalisme fungsional dalam mengelaborasi peran dan fungsi kedua etnis tersebut dalam Daulah ‘Abbasiyah dari sisi sosio-orisnya. Dalam strukturalisme fungsional, seperti yang dikembangkan oleh August Comte 1798 – 1857 M.),Herbet Spencer(1820 – 1903 M.), dan Emile Durkheim, sebuah masyarakat dianggap sebagai sebuah organisme yang merupakan satu kesatuan,[[11]](#footnote-11) yang mana di dalamnya terdapat bagian-bagian lapisan sosial yang dibedakan. Semua lapisan masyarakat termasuk etnis memiliki peran dan fungsi sosialnya masing-masing yang berlainan, sesuai dengan perbedaan status, struktur dan kelasnya. Di dalam teori strukturalisme fungsional paling tidak ada tiga komponen yang penting untuk dielaborasi. Pertama, struktur kekuasaan atau struktur sosial politik dalam sebuah bangsa. Kedua peran dan fungsi masing-masing struktur tersebut. Dan ketiga hubungan atau relasi sosial.

Struktur sosial secara konseptual memiliki hubungan dengan tindakan sosial, interaksi sosial dan perilaku peran.[[12]](#footnote-12) Ia berhubungan dengan kelompok atau komunitas dan institusi, bukan individu (makroskopis), yang dapat menentukan dalam peran dan tindakan sosial politik, seperti dijelaskan Marion Levy mengenai struktur sosial keluarga China dan keluarga Jepang tradisonal yang menjadi faktor penentu bagi laju modernisasi di kedua negara tersebut.[[13]](#footnote-13)

Pola dan model struktur sosial ini juga secara konseptual dapat diaplikasikan dalam kajian mengenai Peran al-Mawali Persia dan Turki pada pemerintahan Daulah Abbasiyah, baik periode pertama maupun kedua. Kedua al-mawali di atas sama-sama suatu komunitas atau kelompok sosial pendatang (al-mawali). Keduanya juga sama berperan dalam perkembanagan dan kemajuan daulah Abbasiyah. Dan kedua-duanya juga berada dalam sebuah institusi Daulah Abbasiyah. Dan ketiga, kedua-duanya juga cukup menentukan arah daulah tersebut meskipun kontras : peran al-Mawali Persia menentukan arah perkembangan dan kemajuan Daulah Abbasiyah pada periode pertama. Sementara al-Mawali Turki sebaliknya, menentukan daulah tersebut ke arah kelemahannya pada periode kedua daulah tersebut.

Dari aspek sosiologis juga dapat dikaji hubungan relasi kuasa (struktur) dengan aspek kultur dalam konteks etnis Persia dan Turki. Dalam hal relasi kuasa, kedua etnis *al-mawali,* yaitu Persia dan Turki, memiliki relasi dengan elite kepemimpinan Daulah Abbasiyah, bahkan mereka menjadi bagian dari elite kekuasaan itu sendiri. Sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah yang menganut sistem pemerintahan kerajaan dibantu oleh perdana menteri (*al-wazir*) sebagai pelaksana operasionalnya, menempatkan kedua etnis tersebut dalam level elite kekuasaan yang berperan secara signifikan dalam tata-kelola (managerial) pemerintahan daulah tersebut. Sehingga relasi kuasa tidak lagi bersifat patron-klien, tetapi lebih bersifat struktural-fungsional. Relasi kuasa juga akan menjelaskan dan menganalisis hubungan-hubungan yang dibangun dalam proses pengangkatan atau penobatan sebagai elite politik, seperti perdana menteri (al-wazir), pegawai-pegawai departemen yang berperan dalam operasional kekuasaan Daulah Abbasiyah. Apakah pengangkaan itu berdasarkan sistem kekerabatan (*corporate group*), oligarkhi atau patrimonial yang lebih bersifat tradisional? Ataukah ia lebih memiliki ciri rasional dan profesional seperti dalam sistem modern?

**B.Pembahasan**

1. Asal-Usul dan Proses Berdirinya Daulah Abbasiyah

Daulah Abbasiyah berasal dari keturunan al-Abbas Bin Abdul Mutalib Bin Hasyim, paman Rasulullah s.a.w. Kata Abbasiyah adalah nisbah kepada al-Abbas sebagai asal keturunan dan nenek-moyang dari para khalifah Abbasiyah. Sebagaimana Rasulullah s.a.w., beliau berasal dari keturunan Hasyim, sehingga ia dapat dikatakan pula Bani Hasyim dari Suku Quraisy. Kekuasaan Bani Hasyim telah eksis lama sejak masa pra Islam,[[14]](#footnote-14) ketika keluarga ini menguasai Baitullah dan sentra-sentra perekonomian serta politik kesukuan di wilayah Arab Utara, khususnya Mekkah. Hasyim sendiri menjadi penguasa di Mekkah pada masa pra Islam (Jahiliyah), menguasai as-Siqayah dan ar-Rifadah di Ka’bah dan menjadi pemimpin bagi Suku Quraisy.[[15]](#footnote-15)

Pada masa kenabian Muhammad s.a.w., beliau telah menyampaikan khabar nubuwah, bahwa suatu ketika dari keturunannya (Bani Abbas) ada yang akan menerima estapeta kekhalifahan, sehingga setelah mendengar khabar tersebut Bani Abbas sangat mengharapkan tiba saatnya memimpin, meneruskan kekhilafahan Islam.[[16]](#footnote-16) Khabar nubuwah itu baru terwujud setelah setelah satu abad lebih, ketika pada tahun 132 H./750 M. Muhammad Bin Abdullah Bin Ali Bin Abdullah Bin Abbas berhasil menumpas Khalifah Muhammad Bin Marwan, menandai berakhirnya Daulah Bani Umayyah dan berdirinya Daulah Abbasiyah.

2. Sekilas Mengenai Daulah Abbasiyah

Dengan demikian, Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari Daulah Bani Umayyah I di Shiria. Ia bagian dari proses sejarah panjang dalam tahapan-tahapan peradaban Islam. Proses sejarah dan peradabaun Islam itu saling berkaitan, meskipun secara politis dan ideologi berlawanan. Perkembangan dan kemajuan peradaban Islam masa Daulah Abbasiyah tidak terlepas dari perkembangan Islam masa Daulah Bani Umayyah sebelumnya yang berperan secara signifikan dalam perluasan wilayah Islam ke tiga benua besar; Asia, Afrika dan Eropa, dan eksistensi kekuasaan Islam. Melalui perluasan wilayah Islam, daulah Islam di satu sisi telah bersinggungan dengan bangsa-bangsa yang berkebudayaan dan berperadaban tinggi dunia di luar Jazirah Arab, seperti Persia, Romawi, Yunani, India Afrika dan Turki. Di sisi lain, ia telah menjadi bagian dari peradaban universal yang telah memberikan kontribusi terhadap peradaban dunia. Dalam kaitan ini, daulah-daulah Islam klasik tidak semata-mata ditinjau dari aspek politiknya saja, tetapi juga penting ditinjau dari aspek peradaban dan kontribusinya yang lebih luas terhadap peradaban dunia.

Proses pendirian Daulah Abbasiyah disokong oleh varian budaya, etnis, bangsa dan kelas sosial yang heterogen. Bangsa Arab, yang terdiri dari beragam klan, seperti klan al-Abbas, klan Arab Selatan dari Yaman (Yamaniyyun), kelopok Syi’ah pendukung Khalifah Ali Bin Abu Talib k.w., dan klan keluarga Ahl al-Bait dan al-mawali dari Persia, termasuk Kurasan, masing-masing berkoalisi dalam suatu ikatan politik dan gerakan latin (rahasia),[[17]](#footnote-17) semenjak setelah berakhirnya pemerintahan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz (102 H/752 M.). Tujuan utama koalisi politis yang tergabung dalam gerakan latin tersebut adalah untuk mendirikan rejim baru di bawah klan al-Abbas dan menggantikan rejim lama di Shiria yang dikuasai oleh klan Umayyah.

Menurut Dr. Muh. Fatah Ilyan, gerakan pemberontakan Abbasiyah ini terbagi dalam dua bagian. Bagian pertama, pemberontakan secara rahasia, berlangsung selama lebih kurang 28 tahun, yaitu dari tahun 100 H. – 128 H., ditandai dengan diangkatnya Abu Muslim al-Khurassani sebagai panglima dalam pemberontakan tersebut. Sedangkan bagian kedua merupakan pemberontakan secara terbuka, berlangsung selama 4 tahun, yaitu sejak Abu Muslim al-Khurassani diangkat menjadi panglima pemberontakan (128 H./746 M.) sampai berdirinya Daulah Abbasiyah pada tahun 132 H./750 M.[[18]](#footnote-18)

Selama masa itu, gerakan latin ini disatukan oleh beragam faktor, termasuk kesamaan pandangan terhadap penentangan Daulah Bani Umayyah. Bagi klan al-Abbas, tujuan politis menjadi prioritas, di samping dari sisi historis ia diilhami oleh keyakinan hak kekuasaan kekhilafahan atas dasar hadith. Rasulullah s.a.w. pernah bersabda, bahwa kelak dari kalangan putra (keturunan) al-Abbas akan memerintah kekhilafahan dalam Islam.[[19]](#footnote-19) Bagi bangsa al-mawali Persia, ia menjadi suatu momentum untuk menunjukkan kebenciaannya selama ini akibat diskriminasi sosial-politik yang mana mereka menjadi kelas sosial termarjinalkan. Sedangkan bagi kelompok Shi’ah gerakan ini selain sebagai bagian dari aksi penentangan dan konflik berkepanjangan, juga merupakan bagian dari prinsip penegakan Imamah berdasarkan prinsip keagamaan. Di samping itu, kedekatan Ali Bin Abu Talib dengan al-Abbas dan prinsip perjuangannya selama dalam gerakan rahasia sesuai dengan ideologi mereka.

Muhammad Bin Ali merupakan tokoh penggerak pertama keluarga al-Abbas yang melakukan penggalangan massa dan langkah-langkah rahasia bermula dari Khurasan, Persia. Menurut al-Tabari, ia telah mulai bergerak secara rahasia sejak tahun 107 M. Dari al-mawali Persia, khususnya Khurasan, Abu Muslim al-Khurasani merupakan tokoh penting dalam melakukan pergerakan untuk penggulingan Daulah Bani Umayyah dan pendirian Daulah Abbasiyah, yang oleh banyak kalangan disebut sebagai sebuah revolusi ini.

3. Para Khalifah Daulah Abbasiyah Periode Pertama

Para sejarawan awal Islam dan sejarawan yang hadir belakangan pada umumnya mencatat jumlah khalifah Daulah Abbasiyah periode pertama itu sebanyak 10 khalifah. Masing-masing khalifah memerintah dalam jangka waktu yang berbeda, namun pada umumnya memerintah hingga masa akhir hayatnya. Mereka secara keseluruhan memerintah hampir dalam kurun waktu satu abad, yakni dari 132 H./750 M. sampai 237 H./846 M.). Mereka adalah Khalifah abad Abu al-Abbas as-Saffah (a. Abu al-Abbas as-Saffah (132 H. – 136 H./750 M. – 754 M), Khalifah al-Manshur (137 – 158 H./754 – 766 M.), Khalifah al-Mahdi (158 – 166 H./774 – 785 M.),[[20]](#footnote-20)Khalifah al-Hadi (169 – 170 H./785 – 786 M.), Khalifah Harun al-Rashid (170 – 193 H./786 – 808 M.), Khalifah al-Amin (193 – 198 H./808 – 813 M.), Khalifah al-Ma’mun (198 – 218 H./ 813 – 833 M.), Khalifah al-Mu’tashim (218 – 227 H./833 – 841 H.), Khalifah al-Wathiq (227 – 232 H./841 – 846 M.) dan Khalifah al-Mutawakkil (232 – 247 H./846 – 861 M.) .

4. Para Khalifah Daulah Abbasiyah Periode Kedua

Khalifah al-Mustntashir Billah (247 H./861 M. - 248 H./862 M.), Khalifah al-Musta’in Billah (248 H. – 251/252 H./866 – 867 M.), Khalifah al-Mu’taz Billah (251 – 255 H./866 – 869 M.),

Khalifah al-Muhtadi Billah (255 H./869 M.- 256 H./870 H.), Khalifah al-Mu’tamad ‘Alallah (256 – 279 H./869 – 892 M), Khalifah al-Mu’tadhid (279 – 289 H./892 – 901 H.), Khalifah al-Muktafi Billah (289 – 295 H./901 – 907 M.), Khalifah al-Muqtadir (295 – 320 H./907 – 923 M.), Khalifah al-Qahir Billah (320 – 322 H./932 – 933 M.), Khalifah ar-Radhi Billah (322 – 329 H./933 – 940 M.), Khalifah al-Muttaqi Lillah (329 – 333 H./940 – 944 M.), Khalifah al-Mustakfi Billah (333 – 334 H./944 – 945 M.)

5. Pemerintahan Daulah Abbasiyah Periode Pertama dan Dominasi al-Mawali Persia

seorang khalifah (raja) pada masa Daulah Abbasiyah memiliki supremasi istimewa yng bercirikan spiritual-keagamaan sebagai *sulthanullah fi ardih*atau *dhillullah fi ardih,* penguasa (sebagai wakil) Tuhan di atas muka bumiNya atau bayang-bayang Allah di atas muka bumi-Nya*.* Inilah platform yang dijadikan asas kerajaannya, memadukan antara kepentingan berbagai kelompok berkoalisi dengan keluarga al-Abbas, yaitu Syi’ah, Ahl al-Bait, kelompok mawali dari Persia dan Khurasan[[21]](#footnote-21) dan identitas yang menjadi ciri utamanya.

Sistem kerajaan yang berlangsung secara turun-temurun dari sanak-tuun al-Abbas merupakan ciri monarikhi heriditas daulah ini.[[22]](#footnote-22) Khalifah yang memerintah, dibantu oleh seorang al-wazir, Perdana Menteri, yang ditunjuk langsung oleh khalifah (raja). Sistem al-wazir ini menjadi ciri pembeda utama dari sistem kerajaan sebelumnya, Daulah Bani Umayyah, yang belum menggunakan fungsi al-wazir. Di samping itu, terdapat diwan-diwan (kementerian) yang membanu al-wazir dan al-amir/al-wali sebagai gubernur pada masing-masing wilayah provinsi.

Dominasi dan pengaruh Persia tampak dalam birokrasi Pemerintahan Daulah Abbasiyah periode pertama. Menurut Bernard Lewis, birokrasi dan administrasi Daulah Abbasiyah merupakan birokrasi gabungan antara birokrasi masa akhir Daulah Bani Umayyah, khususnya masa Khalifah Hisyam Bin Abdul Malik, dan birokrasi yang mengadopsi Kerajaan Sasanian (Persia kuno).[[23]](#footnote-23) Dari dua model birokrasi di atas, model birokrasi Persia lebih mendominasi, karena faktor keterlibatan sejarah al-mawali Persia dalam pendirian Daulah Abbasiyah dan faktor rekruitmen para birokrat pemerintahan didominasi oleh al-mawali dari Persia. Oleh karena itu, al-Jahid menyatakan bahwa pemerintahan Daulah Abbasiyah merupakan representatif dari pemerintahan yang berorientasi Persia.

Di antara sistem birokrasi model Persia yang diadopsi dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah adalah adanya seorang al-wazir (perdana menteri) dalam struktur pemerintahan. Seorang al-wazir (perdana menteri)[[24]](#footnote-24) bertanggung-jawab terhadap berjalannya roda pemerintahan, pengelolaan (managmen) dan tugas-tugas operasional birokrasi pemerintahan. Seorang khalifah menunjuknya atas dasar kemampuan, pengalaman dan kepercayaan.[[25]](#footnote-25)

Di dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh seorang al-wazir, terdapat beberapa departemen (diwan) setingkat kementerian yang bertugas membantunya dalam urusan pemerintahan. Diwan-diwan itu meliputi diwan al-Qadhi (departemen kehakiman), *diwan al-katib* (sekretaris daulah), *diwan al-kharaj* (depeartemen pajak), *diwan al-Qadha, diwan al-hajib* (departemen pengawalan), *diwan al-hars* (Departemen keamanan), *diwan al-barid* (Departemen pos/humas). Administrasi dewan ini pada periode pertama Daulah Abbasiyah banyak didominasi oleh al-Mawali Persia, yang pada umumnya menempati posisi elite pemerintahan.[[26]](#footnote-26)

Sistem diwan ini pada hakikatnya mengadopsi sistem pemerintahan Persia, yang sejak masa Khulafa al-Rasyidin Amir al-Mu’minin Umar Bin Khattab r.a. telah diterapkan. Beliaulah khalifah pertama dalam Islam yang menerapkan sistem dewan, meskipun tidak berada di bawah seorang perdana menteri.

Pada masa Daulah Abbasiyah pemberlakuan kembali sistem dewan yang berada di bawah kendali seorang al-wazir (perdana menteri) memiliki hubungan yang lebih erat dan rasional lagi dengan tradisi dan kebudayaan politik Persia. Pertama, letak geografis Baghdad, Iraq, sebagai Ibu Negara dan pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah bertetangga dengan Persia. Bahkan beberapa dari khalifahnya pernah menetap di wilayah ini. Sebagian isteri dari khalifah pun ada yang berasal dari Persia. Kedua, para pendukung dan penyokong utama Daulah Abbasiyah sejak proses pemberontakan (revolusi) dan pendiriannya berasal dari wilayah Khurasan dan Persia. Ketiga, para perdana menteri yang diangkat oleh khalifah (raja) sejak masa Khalifah al-Manshur juga berasal dari Persia, seperti keluarga Barmaki. Keempat, Persia telah memiliki tradisi dan kebudayaan dalam pemerintahan yang jauh lebih tua, karena telah eksis jauh sebelum masehi. Dengan beberapa poin di atas, wajar jika tradisi birokrasi pemerintahan Persia diadopsi oleh pemerintahan Daulah Abbasiyah. Dalam hal ini para penulis awal Islam, seperti al-Jahidz menyebutkan bahwa sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah berorientasi kepada tradisi Persia. Hal ini juga yang menjadi ciri utama daulah ini sekaligus pembeda dengan tradisi daulah Bani Umayyah sebelumnya yang lebih berorientasi kepada tradisi Romawi dan bangsa Arab (Arabisme).

Sementara di tingkat wilayah (provinsi) tugas dan tanggung-jawab operasional itu berada di bawah seorang al-wali (gubernur). Sebagaimana seorang perdana menteri dan para pejabat di tingkat diwan, seorang gubernur juga dipilih dan diangkat oleh seorang khalifah. Pemilihan dan pengangkatan seorang gubernur menjadi wewenang seoarang khalifah, sehingga sering berasal dari kalangan keluarganya, atau berdasarkan pengalaman dan prestasi sebelumnya, termasuk dalam mengerahkan pasukan tentara untuk tujuan perluasan wilayah. Kadang-kadang seorang gubernur memimpin sebuah wilayah provinsi, namun tidak jarang dia juga membawahi beberapa wilayah, sehingga jumlah wilayah provinsi sering lebih banyak dari jumlah gubernur yang diangkat.

6. Dominasi al-Mawali Turki Masa Daulah Abbasiyah Periode Kedua

Semenjak Khalifah al-Mu’tashim dibai’at dan dinobatkan sebagai Khalifah pada tahun 218 H./833 M. al-mawali Turki mulai mendominasi pemerintahan daulah tersebut. Sebagai seorang khalifah, al-Mu’tashim menumpukan kekuatan dan kekuasaan pemerintahannya pada al-mawali Turki secara totalitas.

Alasan utama rekruitmen al-Mawali Turki[[27]](#footnote-27) ke dalam pemerintahannya adalah untuk lebih memperkuat pasukan militer (tentaranya). Dalam pandangannya, Daulah Abbasiyah memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas, sehingga untuk memelihara dan menjaganya diperlukan pasukan militer (tentara) yang kuat dan gagah berani. Khalifah al-Mu’tashim menemukannya pada etnis Turki.[[28]](#footnote-28) Di samping itu, ibunya adalah juga seorang yang beretnis Turki. Faktor genealogi ini juga mempengaruhi terhadap pemilihan dalam pos-pos militernya berasal dari Turki. Khalifah al-Mu’tashim sendiri terkenal dengan keberaniannya dan kecenderungan karakternya yang suka berperang, memiliki jiwa militer yang kuat di dalam dirinya.

Pembangunan kekuatan militer (ketentaraan) melalui al-Mawali Turki dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah ini merupakan kebijakan Khalifah al-Mu’tashim yang tergolong baru. Rekrutmen secara *massive* dilakukan Khalifah al-Mu’tashim dengan cara mencari, mendatangkan dan merekrut orang-orang Turki dari negara-negara di Asia Tengah, seperti Samarkand, dan Farghana.[[29]](#footnote-29) Mereka direkrut dengan cara dibeli dengan budget yang besar. Disebutkan dalam berbagai sumber, jumlah mereka mencapai 70 ribu orang di Baghdad,[[30]](#footnote-30) sementara para pelayan istana al-Mu’tashim dari al-Mawali Turki mencapai 17 ribu orang. Baghdad sebagai Ibukota daulah menjadi penuh sesak dengan hadirnya al-mawali Turki.

Fakta kuat mengenai dominasi al-mawali Turki dapat dibuktikan dengan dibangunnya Kota Samarra sebagai pusat domisili al-MawaliTurki dan pusat domisili pemerintahan. Ini dilakukan oleh Kahlifah al-Mu’tashim karena banyaknya protes rakyat terhadap rekrutmen besar-besaran al-mawali Turki yang telah menimbulkan kecemburuan sosial dan kebencian bagi bangsa Arab. Konflik antara bangsa Arab, al-mawali Turki dan Khalifah al-Mu’tashim tak terelakkan lagi. Mereka menolak al-mawali Turki karena banyak melakukan keonaran dan kejahatan di Baghdad. Dalam penolakan dan penentangannya mereka berkata,

”Jika khalifah (al-Mu’tashim) tidak membawa pergi pasukan tentaranya (al-Mawali Turki) keluar dari Baghdad, kami (bangsa Arab) akan memeranginya? Lalu Khalifah berkata, bagaimana kalian dapat memerangiku? Mereka menjawab, kami akan memeranginya dengan anak panah yang tajam. Kalau demikian kami tidak mampu melawannya.”[[31]](#footnote-31)

Di dalam periwayatan lain, sebagaimana yang dinukil oleh al-Tabari, penolakan masyarakat Baghdad lebih disebabkan karena kedatangan al-mawali Turki banyak menimbulkan masalah sosial baru. Dikatakan bahwa suatu ketika Khalifah al-Mu’tashim tengah mengendarai kudanya, kemudian berjumpa dengan seorang orang tua penduduk Baghdad.[[32]](#footnote-32)Ancaman dan penolakan dari masyarakat Baghdad itu menjadi cikal-bakal Khalifah al-Mu’tashim memindahkan tempat tinggal al-Mawali Turki dari Baghdad ke Samarra. Khalifah al-Mu’tashim ikut berpindah ke Samarra bersama al-Mawali Turki dan membangun istananya di sana.

**C. Kemajuan Daulah Abbasiyah Periode Pertama di Bawah Doinasi al-Mawali Persia**

1. Kemajuan dalam Bidang Ilmu Pengetahuan

Kemajuan Daulah Abbasiyah periode pertama ditandai oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, politik pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan para khalifah sejak masa Khalifah al-Manshur memerintah (136 – 158 H./754 – 775 M). Kemajuan ini dapat disimpulkan sebagai kemajuan peradaban Islam, mencakup pelbagai aspek kehidupan, sosial, budaya, politik, dan ekonomi.

Perkembangan peradaban Islam telah dimulai sejak pemerintahan di bawah pimpinan Khalifah al-Manshur dan kemajuan peradaban Islam. Khalifah al-Manshur mempelopori gerakan penerjemahan pelbagai ilmu pengetahuan dari luar negeri, terutama berkaitan dengan filsafat, ilmu eksak, kesusasteraan dan yang lainnya. Dalam kaitan ini, as-Suyuthi dengan mengutip pendapat al-Dahabi menyatakan,

“Pada tahun 143 H./761 M. para ilmuwan (ulama) Islam mulai menyusun hadith,fiqh, Tafsir. Maka Ibn Juraih ilmu-ilmu keagamaan itu di Mekkah, Imam Malik Bin Anas (penulis al-Muwatho’) menulis hadith di Madinah, Imam al-Auza’i di Shiria (Syam), Ibn Abu Arabah, Himad Bin Salmah dan yang lainnya di bashrah, Ma’mar di Yaman, Sufyan at-Thauri di Kufah, Ibn Ishaq menyusun kitab al-Maghazi (di Baghdad), Imam Abu Hanifah menyusun kitab Fiqih dan pemikiran. Demikian juga ulama yang lain seperti Husyaim, Laith, Ibn al-Hai’ah, Ibn al-Mubarok, Abu Yusuf, Ibn Wahab, sehingga berkembang luas dan banyak sekali penyusunan ilmu pengetahuan dan pembukuannya. Kitab Bahasa Arab, Bahasa Asing, Sejarah, dan yang lainnya. Sebelum era ini, para ilmuwan (ulama) hanya berbicara keilmuan secara lisan dan hafalan, atau mereka hanya meriwayatkannya dari sumber-sumber yang sahih tanpa disusun secara sistematis.[[33]](#footnote-33)

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Ahmad Amin ketika menjelaskan perkembangan keilmuan di Baghdad, Iraq, pada masa awal Daulah Abbasiyah. Menurutnya perkembangan dalam bidang bahasa dan sastera, pemikiran, ilmu pengetahuan yang mencakup ilmu astronimi, matematika, geografi, dan terjemahan buku-buku Parsia ke dalam bahasa ‘Arab.[[34]](#footnote-34)

Ibn Qutaibah dalam kitabnya al-Ma’arif juga menyebutkan perkembangan dan kemajuan ilmu-ilmu pengetahuan, baik ilmu-ilmu keislaman maupun ilmu-ilmu umum, di Ibu Negara Baghdad. Menurutnya, Baghdad menjadi tumpuan utama baik bagi para penuntut ilmu maupun ulama yang mengajarkannya dari pelbagai wilayah dalam dan luar Jazirah Arab (luar negeri). Bahkan Baghdad pada masa itu bukan cuma pusat keilmuan dan tamadun Islam, tetapi ia juga menjadi tempat bagi mengadu nasib, mengais rizki dan pusat pelancongan yang dikunjungi oleh pelbagai kaum dan bangsa non ‘Arab, sehingga di Baghdad hidup berbagai-unsur etnis dan kebangsaan, baik dari dalam maupun dari luar Jazirah Arab dan agama yang berbeda-beda pula.[[35]](#footnote-35)

Dari pemaparan di atas tampak bahwa pertama, sejak masa kekhalifahan al-Manshur merupakan masa penyusunan dan pembukuan pelbagai ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan keagamaan maupun ilmu pengetahuan umum. Kedua, penyusunan ilmu pengetahuan diawali dengan ilmu-ilmu keagamaan, lalu penerjemahan karya-karya dalam bidang ilmu pengetahuan umum dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab.

Tokoh-tokoh orientalis, seperti Margoliouth, H.A.R.Gibb dan yang lainnya[[36]](#footnote-36) juga mengakui perkembangan pesat dan kemajuan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah periode pertama. Menurut Margoliouth, masa Daulah Abbasiyah periode pertama menandai ranumnya ilmu pengetahuan dan kesusasteraan.[[37]](#footnote-37) Sedangkan Gibb menyatakan bahwa sangat sulit menggambarkan dengan kata-kata mengenai perkembangan pesat, kemajuan yang luar biasa dan pencapaian dalam bidang intelektual dan berbagai bidang lainnya pada periode ini.[[38]](#footnote-38) Oleh karena kemajuan dalam pelbagai bidangnya, masa ini sering disebut sejarawan sebagai masa keemasan (*the golden age*).

Posisi Baghdad tidak saja menjadi pusat kerajaan tetapi juga pusat ilmu pengetahuan yang didatangi oleh pelbagai elemen masyarakat, khususnya para pecinta ilmu pegetahuan, para ulama dan sasterawan menjadi salah-satu daya tarik bagi berkembangnya ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah periode pertama. Di samping itu, kebijakan-kebijakan khalifah, keterlibatan dan kecintaannya terhadap keilmuan merupakan penentu terhadap perkembngan tersebut. Hubungan yang dibangun oleh para khalifah Daulah Abbasiyah periode pertama dengan luar negeri yang memiliki tradisi keilmuan dan kebudayaan tinggi, seperti Yunani, Persia, Romawi dan India menambah kekuatan posisi Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan keilmuan yang didatangi oleh para ilmuwan (ulama), profesional, dan budayawan (sasterawan) dari mancanegara. Mereka pada umumnya datang ke Baghdad untuk mencari nafkah atau mendekatkan diri pada istana Daulah Abbasiyah dengan harapan menjadi penulis, sasterawan atau ilmuwan kerajaan. Ibn Ishaq dan al-Tabari, keduanya merupakan al-Mawali Persia. Ibn Ishaq Bin Yasar dikabarkan berasal dari Persia, sedangkan al-Tabari berasal dari Tabaristan.

Dalam penterjemahan buku-buku asing, *Khalifah* al-Mansur (136 – 158 H./754 – 775 M.) mengundang ahli-ahli bahasa dari dalam dan luar negeriuntuk menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa ‘Arab. Sedangkan dalam menghimpunkan karya-karya ulama, Khalifah al-Mansur memerintahkan ulama-ulama sezaman untuk menuliskan karyanya sesuai bidang keahliannya. Dalam ilmu Hadith muncul al-Muwata’ karya Imam Malik Bin Anas, dalam *sirah* muncul *sirah al-nabi* karya Ibn Ishaq dan dalam bidang fiqh muncul *al-Kharaj* karya Abu Yusuf. Selain itu, sebilangan ulama menjadi penulis atau pegawai resmi kerajaan, seperti Ibn Ishaq dan al-Waqidi.

Masa Khalifah berikutnya, yaitu masa Khalifah al-Mahdi dan al-Hadi, semangat mengembangkan keilmuan yang tidak dikotomis terus berlanjut. Proyek penerjemahan dan pencarian ilmu pegetahuan dari luar negeri untuk kepentingan kebudayaan Islam berkembang meluas, sehingga sang khalifah menjadi bagian dari *agent of change* dalam perkembangan dan kemajuan keilmuan ini. Khalifah al-Mahdi memerinthkan untuk menyusun buku-buku yang berkaitan dengan pemikiran dan perdebatan (dialektika), respon untuk menolak terhadap kelompok Zindiq dan para penentang pemerintah lainnya.[[39]](#footnote-39)Di samping menggiatkan kepenulisan, terjemahan dan pengembangan keilmuan, Khalifah al-Mahdi juga banyak melakukan pembangunan fisik, sarana-sarana publik, hal yang menunjukkan kekuatan ekonomi pada masa pemerintahannya.

Kemajuan pesat ilmu pengetahuan mencapai puncaknya pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan Khalifah al-Ma’mun. Keduanya sangat berjasa dalam memajukan peradaban Islam hingga mencapai masa kejayaannya. Simbol kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam itu ditandai dengan dibangunnya Bait al-Hikmah oleh Khalifah Harun al-Rasyid sebagai perpustakaan terbesar pada masanya, memuat pelbagai buku yang telah disusun sebelumnya, manuskrip dan domumen-dokumen penting. berhasil menubuhkan *Bait al-Hikmah,* sedangkan *Khalifah* al-Ma’mun berjaya pula menterjemahkan buku-buku Falsafah Greek ke dalam bahasa ‘Arab secara besar-besaran.[[40]](#footnote-40)Beliau berjaya pula dalam mengembangkan aliran Mu’tazilah dan menjadikannya sebagai ideologi rasmi kerajaan.

2. Kemajuan dalam Bidang Politik

Politik Daulah Abbasiyah, sebagaimana telah diulas di atas, berbasis masyarakat pluralistik dengan kekuatan dominan al-mawali, khususnya mawali dari Khurassan dan Persia,[[41]](#footnote-41) pada periode pertama pemerintahannya. Dari sisi ini, kebijakan politik Daulah Abbasiyah tampak inklusif (terbuka), berbeda dengan kebijakan politik Daulah Bani Umayyah sebelumnya yang cenderung ekslusif, dengan mengutmakan bangsa Arab atas al-mawali.[[42]](#footnote-42) Selain itu, politik Daulah Abbasiyah secara ideologis berdasarkan flat form religius, yang mana seorang khalifah dipersepsikan sebagai *Sulthanullah fi Ardih atau Dzillullah fi Ardih.*

Sejak masa Khalifah al-Mansur (136 – 158 M./754 - 775 M.), sistem politik yang identik dengan parlemeter telah dikokohkan dengan menempatkan perdana menteri (al-wazir), sebagai pelaksana operasional tugas-tugas pemerintahan. Meskipun demikian, seorang khalifah (raja) merupakan kekuasaan tertinggi dan menjadi sentral dalam setiap pengambilan keputusan. Beliau adalah khalifah Abbasiyah pertama yang menentukan Ibu Negara di Baghdad sekaligus sebagai pusat pemerintahan (politik) dan ilmu pengetahuan (kebudayaan). Keputusannya menempatkan pusat kekuasaan di Baghdad merupakan langkah strategis yang menujukkan keahliannya dalam managmen dan tata ruang kota. Kota Baghdad di bangun sebagai pusat kekuasaan mengikuti model Kerajaan Persia, dibangun persegi empat, dengan pintu masuk yang besar dari masing-masing arah ; Barat, Timur, Selatan dan Utara, dan menamainya dengan Madinah as-Salam.[[43]](#footnote-43)

al-Mas’udi dalam karyanya Muruj al-Dahab menyatakan,“Beliau (Khalifah al-Mansur) memiliki idealisme, keteguhan hati dan mantap dalam pengelolaan (daulah) dan skill politiknya bagus, detail dalam pekerjaannya.”[[44]](#footnote-44)

Kekuatan politik Daulah Abbasiyah yang menyebabkannya mengalami kemajuan pada periode pertamanya selain terletak pada sosok khalifah dan kebijakan-kebijakannya juga terletak pada perdana menteri yang terpilih dan memiliki skill serta pengalaman dalam pemerintahan. Semenjak Khalifah al-Manshur hingga Khalifah Harun al-Rasyid keluarga Barmaki (al-Baramikah) dipilih menjadi perdana menteri.[[45]](#footnote-45) Sebelum keluarga al-Barmaki, Abu Salmah Hafsa Bin Sulaiman al-Khallal, merupakan perdana menteri pertama yang diangkat dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah pada masa Khalifah Abu al-Abbas as-Saffah.

Kekuatan politik juga tampak dari kemampuan Khalifah al-Mansur dalam menanggulangi pelbagai gerakan oposisi, khususnya Syi’ah dan Khawarij, sehingga kedua gerakan tersebut tidak mampu menggoyang eksistensi dan kemapanan Daulah Abbasiyah periode pertama. Langkah strategis Khalifah al-Mansur memindahkan Ibu Kota Daulah dari al-Anbar ke Baghdad juga merupakan langkah politik, yang salah-satunya untuk tujuan keamanan dan kedamaian kota Baghdad. Kota itu sekaligus diberi nama olehnya Dar as-Salam, yang berarti rumah (kota) kedamaian dan kesejahteraan, untuk menegaskan bahwa kota tersebut aman dan damai. Gerakan Khawarij yng berkali-kali gagal melemahkan daulah ini pada akhirnya mencari wilayah baru untuk ditempati dan dijadikan wilayah pemerintahan. Mereka pergi ke Afrika, tepatnya di wilayah Maghrab al-Ausath (Afrika Tengah), membangun komunitas baru mereka di sana dengan cara mendirikan pemerintahan sendiri, seperti Pemerintahan atau Kerajaan Rustumiyah dan Sajalmasah, dua wilayah yang menjadi pusat penyebaran aliran Khawarij di Afrika. Di sana pula mereka mendirikan kerajaannya.

Indikator lain dari kekuatan dan kemajuan politik masa Daulah Abbasiyah periode pertama adalah kemampuan para khalifah dalam membangun hubungan luar negeri, seperti dengan Yunani, Romawi, Persia, India dan yang lainnya, sebagai negeri-negeri yang berperadaban tinggi pada masa jauh sebelum masehi. Hubungan luar negeri ini terutama dilakukan oleh Khalifah Harun al-Rasyid dan Khalifah al-Ma’mun untuk tujuan pengembangan peradaban Islam. Dengan hubungan luar negeri yang dibangun ini, Baghdad, khususnya dan Iraq menjadi wilayah yang banyak diminati oleh pelbagai mancanegara, baik sebagai pusat keilmuan, ekonomi, dan kebudayaan. Tidak jarang juga dari mereka datang ke Baghdad tidak hanya sekedar melancong, tetapi juga mencari nafkah atau mengadu nasib dan profesi. Pada masa Khalifah Harun al-Rasyid berkuasa, sebanyak 8000 dokter datang ke Baghdad untuk meniti karir. Pada masa Khalifah Harun al-Rasyid juga perekonomian Baghdad mengalami peningkatan tajam, surplus ekonomi, menjadi negara paling kaya pada masanya.

**D. Peran al-Mawali Persia dalam Kemajuan Daulah Abbasiyah**

1. Peran dalam Politik

Peran al-Mawali Persia pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah periode pertama

dalam bidang politik dapat dikategorikan dalam dua kategori. Pertama, peran pra berdirinya Daulah Abbasiyah. Kedua, peran setelah berdirinya Daulah Abbasiyah. Kedua-dua peran ini mengacu kepada kontribusi positif yang dilakukan oleh mereka dalam politik, sehingga menyebabkan Daulah Abbasiyah periode pertama mengalami perkembangan dan kemajuan.

Peran pertama berkaitan erat dengan keterlibatan mereka dalam revolusi Abbasiyah atau pemberontakan dan gerakan yang dilakukan dalam proses perjuangan menggulingkan Daulah bani Umayyah di Syria dan pendirian Daulah Abbasiyah. Proses keterlibatan mereka berlngsung cukup lama, selama lebih kurang 32 tahun, yaitu sejak tahun 100 H./719 sampai tahun 132 H./750 M.[[46]](#footnote-46) Dalam pemberontakan ini, mereka pada umumnya adalah masyarakat awam al-mawali dari Persia dan Khurassan yang pada masa Daulah Bani Umayyah di Syria termarginalkan dan kerap mendapatkan perlakuan diskriminatif. Namun demikian, terdapat pula tokoh yang terkemuka dan memiliki peran signifikan dalam proses gerakan pemberontakan tersebut, seperti Abu Muslim al-Khurassani. Beliau berperan sebagai panglima perang dalam barisan tersebut. Pemberontakan ini dimulai dari Merve, wilayah Persia, yang pada saat itu masih menjadi salah-satu provinsi Daulah Bani Umayyah di Syria. Desa-desa yang ada di Merve, salah-satu wilayah Khurrasan, Persia, yang menurut al-Tabari mencapai 60 desa, ikut bergabung dalam pemberontakan tersebut.

**M**ayoritas pengikut dan pendukung pemberontakan tersebut adalah para al-Mawali Persia di bawah pimpinan Abu Muslim al-Khurrasani. Hal ini ditegaskan baik oleh Benard Lewis maupun Wllhausen, sebagaimana dikutip kembali oleh M.A. Shaban,

*“The majority of his (Abu Muslim’s) adherents consist of Iranian peasents and of the mawali of the village of Merv, but there were Arabs among them also who mostly accupied leading positions. Bernard Lewis seems to agree to some extent with this opinion: “While his (Abu Muslim’s) main appeal wa to the Persian mawali, he also found important upport among the Yamanite Arabs.”[[47]](#footnote-47)*

Menurut berbagai sumber, jumlah al-Mawali Khurassan dan al-mawali Persia yang ikut bergabung sebagai tentara dalam pemberontakan di bawah pimpinan Abu Muslim al-Khurassani ini mencapai 7.000 (tujuh tentara). Di bawah kepemimpinan Panglima Abu Muslim al-Khurassani, peran ini cukup berhasil dalam merealisasikan tujuannya. Faktanya mereka mampu menghancurkan kekuatan tentara Bani Umayyah dan menghancurkan daulahnya pada tahun 132 H./750 M.

Peran kedua adalah peran al-mawali Persia, termasuk di dalamnya wilayah-wilayah bagian seperti Khurassan dan Merve, merupakan peran yang lebih real dalam merealisasikan perkembangan pesat dan kemajuan Daulah Abbasiyah selama periode pertama dari pemerintahannya. Sebagai bagian dari aliansi politik yang ikut terlibat aktif selama pemberontakan Abbasiyah, sudah barang tentu al-Mawali Persia menjadi bagian penting dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah periode pertama. Peran politik yang mereka emban juga termasuk prestisius, karena para khalifah Abbasiyah menempatkan mereka pada pos-pos struktur elite pemerintahannya. Pos perdana menteri dan pos-pos departemen (kementrian) di bawah tanggung-jawab perdana mentri juga diberikan kepada mereka. Demikian juga pos-pos dalam militer (ketentaraan), yang sebelumnya dipegang oleh bangsa Arab, kini beralih ke tangan para al-Mawali Persia. Merekalah yang menjadi aktor-aktor utama yang berperan dalam operasional fungsi-fungsi pemerintahan Daulah Abbasiyah.

2. Peran dalam Kebudayaan

a. Ilmu Pengetahuan

Kebudayaan menyangkut kreatifitas manusia, segala aktifitas yang memiliki daya kreasi (menccipta/berkarya), hasil olah pikir, budi-perilaku, tradisi dan rasa, termasuk dalam kategori kebudayaan. Dalam konteks peran al-Mawali Persia masa Daulah Abbasiyah periode pertama, salah-satu aspek kebudayaan terpenting adalah ilmu pengetahuan. Menurut Ibn Khaldun, meskipun peradaban Islam awal dan perkembangannya berasal dari Jazirah Arab, namun para ilmuwan dan ulamanya banyak yang berasal dari luar Arab, secara khusus al-Mawali Persia. Hal ini dapat ditelusuri dalam konteks peran al-Mawali Persia pada masa Daulah Abbasiyah periode pertama.[[48]](#footnote-48) Untuk menelusuri dan menunjukkan peran al-mawali Persia dalam ilmu pengetahuan dapat dibahas melalui dua cara. Pertama, karya-karya al-Mawali Persia yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada masa Daulah Abbasiyah periode pertama atau sesudahnya. Kedua, karya dan penulisnya yang dapat ditelusuri atau memang disebutkan dalam sejarah. Kedua-duanya akan digunakan dalam sub bahasan ini.

Sejak ilmu pengetahuan disusun dan dibukukan pada masa Khalifah al-Mansur (136 – 158 H./754 – 776 M.), masyarakat dari luar Arab yang telah memeluk agama Islam (al-mawali) tidak saja banyak dan berkembang tetapi mendominasi dalam ranah keilmuan, khususnya al-Mawali Persia. Karya-karya al-mawali Persia, pada masa era gerakan penerjemahan buku-buku asing dari luar Arab sejak masa Khalifah al-Mansur hingga masa Khalifah al-Ma’mun, banyak sekali yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Mehdi Nekosten menyebutkan bahwa karya-karya al-mawali Persia tersebar dalam berbagai bidang; moral, sejarah, sastera, astronomi dan buku-buku ilmiah yang lainnya, yang kemudian disebarluaskan ke seluruh dunia Arab (Islam) dan Barat.[[49]](#footnote-49)

Di antara penerjemah terkenal Persia, yang menerjemahkan karya-karya Persia ke dalam bahasa Arab adalah Ibn Muqaffa. Dia menerjemahkan karya penting,”Kalila Wa Dimna,” yang terkenal dan tersebar ke belahan dunia Timur dan Barat. Selain karya Kalila Wa Dimna, dia juga menerjemahkan karya-karya lainnya ke dalam bahasa Arab, antara lain, *Khudai Namah* (Sejarah Sasanian), *Ain Namah* (Lembaga Waktu), al-Yatima, (tentang moral politik Sasanian), dan buku lainnya tentang *Mazdak* dan *Taj* (politik) dan tentang *Adab*.[[50]](#footnote-50)Selain Ibn Muqaffa, masih banyak lagi penerjemah karya-karya Persia ke dalam bahasa Arab, di antaranya Aban al-Laikhi, Ahmad Bin Tabir Taifur, dan Naubakht. Demikian juga al-Baladuri, Jabala Ibnu Salem, Tamimi, al-Farrukhan, Ishaq Bin Yazid,[[51]](#footnote-51) kesemuanya berjasa dalam menerjemahkan karya-karya Persia ke dalam bahasa Arab.

Para penulis awal Sirah al-Nabi, seperti Ibn Ishaq dan Ibn Hisyam, merupakan al-mawali dari Persia. Ibn Ishaq adalah penulis Sirah al-Nabi pertama yang tulisannya sampai kepada kita. Ibn Ishaq merupakan seorang ahli hadith, murid Ibn Sihab al-Zuhri, yang sezaman dengan Imam Malik Bin Anas penulis kitab al-Muwatho’. Keahliannya dalam bidang hadith dan Sirah al-Nabi diakui sendiri oleh gurunya, Imam az-Zuhri, sehingga dia pun dipanggil oleh Khalifah al-Mansur ke istananya di Baghdad, untuk menuliskan sejarah sejak masa awal hingga masa kekhalifahannya.

Penulis sejarah lainnya, seperti Muhammad Ibn Jarir al-Tabari, penulis kitab Tarikh al-Rusul wa al-Muluk atau Tarikh al-Tabari, seorang ulama besar abad ke-3 H. juga seorang al-mawali dari Tabaristan, salah-satu wilayah di Persia. Beliau tidak hanya menulis mengenai sejarah dunia (universal), tetapi juga ahli dalam al-Qur’an dan tafsirnya, Qira’ah, hadith dan Fiqih. Karya al-Tabari dalam bidang tafsir al-Qur’an merupakan karya tafsir pertama yang lahir dan sampai kepada kita secara lengkap.[[52]](#footnote-52)

Peran kebudayaan al-Mawali Persia juag dapat ditunjukkan dengan berkembangnya aliran-aliran dalam sejarah sejak masa Daulah Umayyah di Syria. Selain aliran sejarah Madinah, Iraq, Syria, dan Yaman, juga terdapat aliran Persia. Kemunculan airan sejarah Persia ini didorong oleh faktor Syu’ubiyah (kebangsaan) kaum al-Mawali Persia, yang di satu sisi disisihkan dan dimarginalkan pada masa Daulah Bani Umayyah. Namun di sisi lain, mereka justru mendapatkan kedudukan tinggi dan previllage pada masa Daulah Abbasiyah. Syu’biyah menekankan keinginan untuk menonjolkan kebudayaannya sendiri (Persia) dan menjadikannya superior di atas kebudayaan lainnya. Hal ini tampak dari karya-karya kesejarahan yang dikembangkannya merupakan karya-karya kesejarahan Persia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.

**E.Kemunduran Daulah Abbasiyah Periode Kedua dan Dominasi al-Mawali Turki**

1. Kemunduran Politik Pemerintahan

Daulah Abbasiyah periode kedua mulai mengalami kemunduran, khususnya dalam bidang politik dan pemerintahan. Dalam lingkaran istana Daulah Abbasiyah, al-Mawali Turki menguasai dan mengendalikan kekuasaan. Para khalifah seperti boneka yang dikendalikan dari belakang layar.Ali Ibrahim Hasan menyatakan para khalifah Abbasiyah periode kedua ini ibarat para tawanan perang yang ditawan oleh al-Mawali Turki. Mereka seolahtidak memiliki kekuasaan dan pengaruh lagi.[[53]](#footnote-53) Indikator kemunduran politik dapat dicermati dari fakta berikut,

a. Pembunuhan terhadap Para Khalifah

Di dalam istana khalifah, sejak Khalifah al-Mutawakkil berkuasa khususnya, perebutan kekuasaan terjadi saling bergantian. Al-Mawali Turki seringkali terlibat dalam perebutan kekuasaan tersebut melalui konspirasi dengan khalifah yang berambisi memerintah, atau melalui rekayasa sesuai kehendak mereka. Pembuuhan demi pembunuhan terhadap para khalifah yang berkuasa terjadi dalam pengawasan dan kontrol al-mawali Turki. Khalifah al-Mutawakkil dibunuh atas konspirasi antara al-Mawali Turki dengan al-Muntashir. Ini terjadi karena kekecewaan al-Muntashir atas penunjukkan Khalifah al-Mutawakkil terhadap al-Mu’tazz sebagai putra mahkota penggantinya, padahal menurut ketentuan yang berlaku, al-Muntashir dan al-Muayyadlah yang berhak menjadi penggantinya.

Atas keberhasilan konspirasi ini, al-Muntashir (247 – 248 H./862 – 863 M.) naik tahta menjadi khalifah menggantikan ayahnya, Khalifah al-Mutawakkil. Namun kekhalifahannya hanya berjalan satu tahun saja, beliau mati dengan cara diracun atas rekayasa dan konspirasi al-Mawali Turki dengan dokter pribadinya, Ibn Thoifur.[[54]](#footnote-54) Demikian juga ketika Khalifah al-Musta’in berkuasa (248 – 252 H.) menggantikan khalifah al-Muntashir. Meskipun masa kekuasaannya berlanngsung selama empat tahun, namun masa kekhalifahannya merupakan masa pancaroba dan masa bergulirnya fitnah serta ketidak-menentuan. Di samping itu, beliau juga dikenal lemah dalam ide, perencanaan dan pengelolaan pemerintahan. Oleh karena itu, dengan sangat mudah para elite al-Mawali Turki melengserkannya dan mencopot mandat khalifahnya dengan cara dipaksa kemudian diasingkan dan akhirnya dibunuh.[[55]](#footnote-55)

Khalifah al-Mu’taz (252 – 255 H./866 – 868 M.) putra al-Mutawakkil menggantikan saudaranya, Khalifah al-Musta’in. Suksesi kepemimpinan ini pun tidak mampu mengembalikan kewibawaan khalifah dan Daulah Abbasiyah. Kekuasaan dan dominasi al-Mawali Turki semakin kuat mencengkram dalam istana Daulah Abbasiyah.

Maka Khalifah al-Mu’taz pun mendapati nasib yang sama dengan para khalifah sebelumnya, wafat dengan cara dibunuh oleh elite al-Mawali Turki. Pembunuhan terhadap Khalifah al-Mu’taz oleh mereka tergolong sadis. Disebutkan bahwa dalam pembunuhan itu, sekelompok elite al-Mawali Turki masuk ke kamar khalifah lalu menendang, memukula dengan tombak, mencopot dan membakar pakaian kebesarannya, menjemurnya di tempat yang sangat panas dan menyiksanya hingga wafat.

b. Perselisihan dalam Istana Daulah Abbasiyah

Sejak masa Khalifah al-Mutawakkil memerintah (232 – 247 H./846 – 861 M.), selain Daulah Abbasiyah dikuasai penuh oleh tentara Turki,[[56]](#footnote-56) keadaan dalam istana Daulah Abbasiyah juga mulai mengalami konflik internal yang menyebabkan kekisruhan dan kelemahan atau kemunduran dalam bidang politik. Khalifah al-Mutawakkil merubah pola pergntian putra mahkota (calon pengganti khalifah), dengan cara mengangkat ketiga-tiga putranya, yaitu al-Muntashir, al-Mu’taz dan al-Muayyad sebagai penggantinya. Ketiganya dibait, dinobatkan sebagai para panggantinya, diberikan pembagian kekuasaan di wilayah tertentu yang menjadi tanggung-jawabnya.[[57]](#footnote-57) Akibat pembagian kekuasaan ini, Khalifah al-Muntshir yang merasa kecewa karena beliaulah yang paling merasa berhak menggantikan ayahnya, memohon bantuan tentara al-Mawali Turki. Dengan pertolongan dari al-Mawali Turki ini, maka al-Muntashir dapat dinobatkan menjadi khalifah menggantikan ayahnya.[[58]](#footnote-58) Setelah kematian Khalifah al-Muntashir, tentara-tentara Turki tidak mengambil bai’at kepada al-Mu’taz maupun al-Mu’ayyad yang telah dipersiapkan sebagai pengganti berikutnya. Sebaliknya mereka justru membai’at al-Musta’in sebagai pengganti Khalifah al-Muntashir. Sejak saat inilah terjadi fitnah yang berkesinambungan dari satu khalifah kepada khalifah yang lainnya dalam istana Daulah Abbasiyah. Para khalifah tidak jarang melakukan konspirasi politik dengan para tentara Turki yang telah mendominasi Daulah Abbasiyah demi mendaatkan jabatan khalifah, meskipun yang menjadi korbannya adalah saudaranya sendiri. Dari sinilah salah-satunya kemunduran politik Daulah Abbasiyah periode pertama perlahan-lahan menimpa dalam istananya sendiri.

c.Terpecah-Belahnya Wilayah Daulah Abbasiyah

Indikator lain mengenai mundurnnya Daulah Abbasiyah dari aspek politik adalah banyaknya provinsi di beberapa wilayah kekuasaannya yang luas memisahkan diri atau memerdekakan diri, kemudian mendirikan kerajaan sendiri yang terlepas dari Daulah Abbasiyah. Hal ini menyebabkan kekuatan politis Daulah Abbasiyah menjadi terpecah-belah ke dalam banyak kerajaan, baik kerajaan besar maupun kecil. Posisi khalifah yang lemah dan dikendalikan oleh al-Mawali Turki, kontrol politik yang lemah, dan luasnya wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah, meliputi tiga benua besar: Asia, Afrika dan sebagian Eropa, menjadi beberapa faktor terpecah-belahnya kekuasaan daulah tersebut. Sebenarnya, fenomena memisahkan diri dari pemerintahan pusat dan menjadikan satu atau beberapa wilayah provinsi menjadi kerajaan yang mandiri, telah ada sejak masa pemerintahan Daulah Abbasiyah periode pertama.[[59]](#footnote-59) Namun pada masa pemerinahan Daulah Abbasiyah periode kedua, provinsi-provinsi yang memerdekakan diri itu lebih banyak lagi. Hal ini berkaitan dengan lemahnya sistem dan posisi khalifah pada masa Daulah Aabbasiyah periode kedua.

Di antara kerajaan-kerajaan kecil yang memisahkan diri tersebut adalah Kerajaan Thahiriyah di Khurasan (Persia) (205 – 259 H./820 - 872 M.) Kerajaan Al-Ya’fariyah, Shan’a (Yaman), 225 – 303/839 – 1002 M., Az-Ziyadiyah, Zabid, 203-412H./818-1021M., Kerajaan Az-zaidiyah (at-Tibriyah, Thabaristan, (255 – 316/868 – 929 M.), Kerajaan Thuluniyah, Mesir (254-292H./868-903M.), Kerajaan As-Shafariyah, Iran,Herat, Asia Tengah,(254-292H./868-903M.), Kerjaan Samaniyah, Asia Tengah,(261-390H./874-1000M.),Az-Zaidiyah (Bani ar-Rasiy), Sha’dah dan Shan’a,(280-1382H./893-962M.), dan Ubaidillah/Fatimiyah, Maghrib dan Mesir (297 – 567 H./909 – 1171 M.)

Jika dicermati, dari beberapa kerajaan kecil yang memisahkan diri, tampak bahwa wilayah Afrika Utara merupakan wilayah yang paling banyak. Kerajaan-kerajaan kecil ini menjadi titik kelemahan politik pemerintahan Daulah Abbasiayah periode kedua. Potensi-potensi wilayah provinsi semakin digerusi oleh disintegrasi.

2. Kemunduran dalam Kebudayaan

a. Pemikiran

Masa Khalifah al-Mutawakkil merupakan masa transisi Daulah Abbasiyah, antara akhir periode pertama masa kemajuan, dengan awal periode kedua, masa kemunduran. Namun jika dihitung sejak dari direkrutnya al-Mawali Turki, ia telah masuk masa kemunduran pemerintahan Daulah Abbasiyah. Sejak masa Khalifah al-Mutawakkil, terdapat fenomena ke arah kemunduran Daulah Abbasiyah dalam bidang kebudayaan, khususnya pemikiran. Khalifah al-Mutawakkil secara terbuka memproklamirkan pencabutan/pembatalan aliran teologi Mu’tazilah sebagai mazhab negara. Beliau juga melarang propaganda Mihnah, mengenai kemakhluqan al-Qur’an. Sebaliknya beliau menggantikan teologi Mu’tazilah dengan teologi Sunni atau Ahlu as-Sunnah. Proklamasi atau pernytaan ini dilakukan Khalifah al-Mutawakkil di Masjid Jami’ Baghdad, Iraq dihadiri oleh ribuan ulama pendukungnya. Sejak saat itu, teologi Mu’tazilah dilarang dan tradisi Sunnah dihidupkan kembali, sehingga kelompok-kelompok tradisonal, seperti para penganut Mazhab Imam Hanbali mendapatkan kesempatan yang baik untuk menyebar-luskan ajarannya. Demikian juga kelompok Sunni, mereka memperoleh momentum yang tepat untuk mengembangkan ajaran-ajarannya.

Perubahan kebijakan ini, dalam konteks kebudayaan, khususnya pemikiran, tentunya menjadi indikator kemunduran. Karena kebebasan berfikir, rasionalisme dan penggunaan akal fikiran, yang menjadi ciri dan karakteristik aliran teologi Mu’tazilah, dilarang untuk disebar-luaskan. Sebaliknya teologi Sunni yang bercirikan ortodoksi dan menekan kebebasan berfikir, bahkan dalam banyak hal cenderung fatalistik justru dikembangkan. Demikian juga aliran tradisional yang disebar-luaskan Imam Hanbali dan para pengikutnya, yang cenderung tekstualis justru diberi kebebasan. Indikator ini, sebenarnya memiliki hubungan erat dengan tidak lagi berkembangnya kajian-kajian kefilsafatan dan metode berfikir kritis rasional. Hal ini pada gilirannya menyebabkan masyarakat awam sedikit-demi sedikit meninggalkan kajian filsafat, yang pada masa Khalifah al-Ma’mun sangat maju. Dalam konteks inilah masa Daulah Abbasiyah periode kedua mengalami kemunduran dalam bidang pemikiran tersebut. Apalagi kebijakan al-Mutawakkil tersebut diikuti dan diteruskan oleh para khalifah sesudahnya.

**F. Faktor-Faktor Pendorong Kemajuan Politik dan Kebudayaan Daulah Abbasiyah Periode Pertama Masa Dominasi al-Mawali Persia**

Paling tidak, berdasarkan penelusuran smber-sumber sejarah yang ada dan beberapa uraian bahasan sebelumnya, terdapat tiga faktor yang menyebabkan Daulah Abbasiyah mengalami kemajuan, baik dalam politik maupun kebudayaan pada masa daulah Abbasiyah periode pertama. Ketiga faktor itu adalah faktor keterlibatan atau partisipasi dalam proses sejarah, faktor historis bangsa Persia dan faktor wilayah geografis.

1.Faktor Keterlibatan/Partisipasi dalam Proses Sejarah

Yang dimaksud dengan keterlibatan atau partisipasi dalam proses sejarah adalah keikutsertaan dan peranan al-Mawali Persia dalam proses pendirian Daulah Abbasiyah. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwa al-Mawali Persia merupakan salah-satu komponen atau unsur sosial yang menjadi bagian dari kelompok koalisi yang terlibat dalam revolusi atau pemberontakan dalam menghancurkan Daulah Bani Umayyah dalam mengakhiri Daulah Bani Umayyah dan mendirikan Daulah Abbasiyah. Jumlah mereka dalam pemberontakan itu cukup signifikan[[60]](#footnote-60) dan keterlibatan serta peran mereka berlangsung cukup lama, yakni selama 32 tahun, sejak gerakan rahasia (latin) bergerilya dari Hasyimiyah hingga pemberontakan terbuka di bawah pimpinan Abu Muslim al-Khurassani.

Dalam proses keterlibatan ini, ada suatu ikatan politik, mentalitas dan kesadaran bersama, yang dibangun atas kondisi psikologis yang relatif berbeda. Ikatan politik mereka adalah membangun kekuatan politik baru yang berkeadilan dan berkesetaraan, tidak diskriminatif seperti selama ini yang mereka alami selama pemerinthan Daulah Bani Umayyah. Sedangkan ikatan mentalitas terbangun atas kesadaran pentingnya tatanan baru yang menjadi harapan bersama al-mawali Persia. Secara psikologis mereka tertekan selama puluhan tahun dalam tatanan sosial politik yang cenderung diskriminatif dan menganaktirikannya. Hal ini berbeda dengan keluarga Abbasiyah, yang secara psikologis telah lama mengharapkan kekuasaan itu beralih ke tangan mereka, karena mereka tahu hal itu dari beberapa hadith nabi Muhammad SAW. yang menyatakan bahwa mereka akan memegang tumpuk kepemimpinan setelah kenabian.[[61]](#footnote-61)

Dalam proses keterlibatan pemberontakan selama lebih dari 30 tahun itu, terdapat perasaan senasib dan pengalaman yang menguatkan memori kebersamaan dan kesatuan utuk tujuan politik yang sama. Dalam kaitan ini, ikatansenasib seperjuangan muncul, hubungan solidaritas terbangun dalam sistem partnership di antara mereka. Dengan keterlibatan dalam pemberontakan tersebut dan hubungan partership berdasarkan kepentingan dan tujuan yang sama, yaitu mengakhiri kekuasaan Daulah Bani Umayyah dan memperoleh kekuasaan demi terwujudnya tatanan masyarakat Islam yang lebih egaliter. Maka kaum al-Mawali Persia menjadi bagian penting tak terpisahkan dalam keluarga Abbasiyah.

Ketika tumpuk kekuasaan telah berada di tangan keluarga Abbasiyah, hubungan yang sangat erat ini terus berlanjut, kaum al-Mawali Persia memperoleh keutamaan dan kedudukan politik yang strategis dalam pemerintahan yang baru berdiri tersebut. Kaum al-Mawali Persia menduduki hampir seluruh pos dalam struktur pemerintahan; perdana menteri, tentara (militer) dan sebagian departemen-departemen dalam pemerintahan. Oleh karena itu, pernyataan banyak sejarawan mengenai hilangnya peran bangsa Arab dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah dan menguatnya peran etnis al-Mawali Persia memiliki relevansi historisnya. Hal ini merupakan suatu konsekuensi dari keterlibatan mereka dan hubungan partnership yang telah terbangun sejak lebih dari tiga puluh tahun.

2. Faktor Sejarah Bangsa Persia

Bangsa Persia termasuk bangsa yang memiliki kebesaran sejarah masa lulu, yaitu Kerajaan Sasanian atau Persia Kuno, sehingga mereka memiliki tradisi dan kebudayaan yang tinggi (high tradition). Kebesaran Kerajaan Sasanian atau Persia Kuno ini berlangsung ribuan tahun yang lalu dan masih tetap eksis hingga kemunculan dan perkembangan Islam di wilayah Jazirah Arab. Secara politik, Kerajaan Sasanian (Persia) ini pernah menjadi negara adidaya yang bersaing dan saling mengalahkan dalam peperangan dengan Romawi sebagai kekuatan Barat. Beberapa wilayah di Jazirah Arabia, seperti Hirah (Iraq dan sekitarnya) menjadi kerajaan kecil sebagai koloni Kerajaan Persia pada tahun 529 – 557 S.M.[[62]](#footnote-62)

Selain memiliki kekuasaan politik yang besar, Kerajaan Persia juga memiliki tradisi kebudayaan yang tinggi. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Kerajaan ini pernah mengembangkannya melalui pendidikan dan perpustakaan Jundi Shapur.

Pada masa Daulah Abbasiyah periode pertama, ketika mayoritas al-Mawali Persia mendominasi pemerintahan, peran dan pengaruh politik Persia itu cukup kuat dengan beberapa indikator berikut. Pertama, penggunaan sistem pemerintahan berdasarkan sistem *al-wazir* (perdana menteri) merupakan sistem pemerintahan Kerajaan Persia yang kemudian diadopsi ke dalam pemerintahan Islam masa Daulah Abbasiyah. Kedua, pengangkatan perdana menteri sejak masa Khalifah as-Saffah hingga Khalifah Harun al-Rasyid yang berasal dari al-Mawali Persia. Ketiga, pembangunan istana Baghdad sebagai pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah tahun 145 H./ pada masa Khalifah al-Mansur, sebagaimana dinyatakan banyk sejarawan, juga mengikuti pola pembangunan Kerajaan Persia, yang mana pembangunan pintu masuk istana didesain dengan empat arah, berdasarkan pada pola desain Kerajaan Persia.

Demikian juga dalam kebudayaan, khususnya pengembangan keilmuan. Pembangunan perpustakaan Baitul Hikmah sebagai perpustakaan dan pusat keilmuan pada masa Khalifah Harun al-Rasyid juga menurut para sejarawan memiliki kaitan historis dengan Perpustakaan Jundi Shapur pada masa Kerajaan Persia di bawah Raja Anushirwan. Disebutkan dalam berbagai sumber sejarah awal Islam bahwa Raja Anushirwan adalah seorang Raja Persia yang sangat mencintai ilmu pengetahuan dan para ilmuwan, sehingga dibangunlah Perpustakaan Jundi Shapur sebagai pusat keilmuan pada masanya. Dalam kaitan ini, Khalifah Harun al-Rasyid terinspirasi dengan kebesaran Jundi Shapur sebagai pusat keilmuan, sehingga sang khalifah tergerak untuk membangun perpustakaan sebagai pusat keilmuan yang sama di Baghdad, Iraq. Kebetulan bahwa Khalfah Harun al-Rasyid juga, sebagaimana halnya Raja Anushirwan, sama-sama mencintai ilmu pengetahuan, kesusasteraan dan para ilmuwan (ulama).

3.Faktor Geografis

Menurut Braudel, salah-satu syarat peradaban suatu bangsa mesti memiliki wilayah geografis,[[63]](#footnote-63) yang dapat menentukan dinamika bangsa tersebut dalam kancah hubungan dengan pelbagai bangsa lainnya. Baghdad yang dibangun oleh Khalifah al-Mansur pada tahun 145 H./763 M. menempati letak wilayah yang strategis karena diapit oleh dua sungai besar; Sungai Tigris dan Euprat (Furat), terletak di jalur navigasi yang mudah dilalui oleh pelbagai bangsa dari pelbagai arah penjuru dunia. Disebutkan dalam beberapa sumber, sebagaimana dinyatakan oleh al-hatib al-Baghdad bahwa Khalifah al-Mansur memilih kota Baghdad sebagai Ibukota pemerintahan telah melalui pengkajian yang matang sebelumnya oleh beberapa pakar geografis yang khusus didatangkan sebelum menentukannya sebagai Ibukota pemerintahan yang sebelumnya sempat berpindah-pindah tempat dari Hasyimiya, Kufah, Anbar, hingga Baghdad.

Baghdad, sebagaimana dinyataka oleh al-Ya’qubi dan dikutip kembali oleh Lewis, merupakan jalur perdagangan dunia melalui sungai, baik dari arah Asia, Afrika, maupun Eropa[[64]](#footnote-64) dapat dengan mudah berlabuh dan singgah di Baghdad. Dari sisi ini, letak geografis Baghdad menguntungkan terhadap pertumbuhan perekonomian dan hubungan antar pelbagai bangsa di dunia. Selain itu, letak geografis Baghdad dari arah barat juga berdekatan atau bertetangga dengan Persia. Bahkan dulunya, wilayah Baghdad ini pernah menjadi ibukota Kerajaan Sasanian Kuno. Jika dirunut lebih jauh lagi ke belakang, jauh sebelum Kerajaan Sasanian Muncul, wilayah di sekitar Sungai Tigris dan Euphrat itu pernah ditempati oleh beberapa peradaban awal dunia, seperti Mesopotamia dan Babylonia. Oleh karena itu, sangat logis jika Baghdad didatangi oleh pelbagai bangsa dan menjadi pusat peradaban dunia pada masa Daulah Abbasiyah periode pertama. Pada masa Khalifah Harun al-Rasyid, wajar jika Baghdad pernah mengalami kemajuan ekonomi yang sangat pesat, menjadi adi daya di dunia pada masanya.

Meskipun pelbagai bangsa bercampur-baur di Baghdad pada masa Daulah Abbasiyah periode pertama, namun bagaimanapun bangsa Persia yang secara geografis bertetangga merupakan bangsa yang paling dominan. Oleh karenanya, al-Mawali Persia sangat mendominasi dan berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan peradaban Islam. Letak geografis Persia yang bertetangga dengan Baghdad, Iraq, dan adanya ciri khusus kedua bangsa tersebut yang secara geografis memiliki makna signifikan bagi peradaban, menjadikan keduanya memiliki sinergitas bagi terwujudnya kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam pada periode pertama pemerintahan Daulah Abbasiyah.

**G. Faktor-Faktor Pendorong Kemunduran Politik dan Kebudayaan Daulah Abbasiyah Periode Kedua Masa Dominasi al-Mawali Turki**

Secara umum, sebagian besar faktor-faktor kemunduran politik dan kebudayaan Daulah Abbasiyah periode kedua masa dominasi al-Mawali Turki merupakan kebalikan dari faktor-faktor kemajuan pada periode pertama masa dominasi al-Mawali Persia. Hal ini berdasarkan pada fakta-fakta kesejarahan mengenai eksistensi dan peran al-Mawali Turki dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah periode kedua. Oleh karena itu, beberapa faktor kemunduran tersebut dapat dinyatakan dalam beberapa poin berikut.

1. Ketidak-terlibatan al-Mawali Turki dalam Proses Sejarah Daulah Abbasiyah

Berbeda dengan al-Mawali Persa yang telah terlibat sejak pra pendirian Daulah Abbasiyah dalam konteks pemberontakan dalam mengakhiri domonasi kekuasaan Daulah Bani Umayyah di Syiria, al-Mawali Turki tidak memiliki proses keterlibatan tersebut dalam bergabungnya dengan Daulah Abbasiyah. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab dua sebelumnya, bahwa kaum al-Mawali Turki masuk dan menjadi bagian dari elite politik dan kekuasan pada Daulah Abbasiyah periode kedua melalui rekruitmen langsung oleh Khalifah al-Mutashim dengan pertimbangan untuk lebih memperkuat kekuasaannya. Mereka (al-Mawali Turki) dicari dan ditelusuri ke beberapa wilayah di Bukhara, Balkhan dan perbatasan Turki, sebagiannya berasal dari budak-budak yang dijual-belikan di pasar-pasar, untuk dijadikan tentara (militer) pada pemerintahan Daulah Abbasiyah. Proses rekruitmen ini dapat disebut sebagai tindakan politik *top down* yang dilakukan Khalifah al-Mu’tashim, yang salah-satunya terpengaruh karena ibunya seorang juga berkebangsaan Turki. Alasan lainnya sangat boleh jadi karena “kepercayaan” Khalifah al-Mu’tashim terhadap al-Mawali Turki yang memiliki kekuatan fisik, yang sangat layak untuk menjadi tentara (militer) pendukung utama pemerintahannya.

Akan tetapi, jika ditinjau dari aspek ketidak-keterlibatan mereka dalam proses pembentukan pemerintahan Abbasiyah, atau dalam daulah Islam sebelumnya, seperti Daulah Bani Umayyah, tentunya mereka bukanlah komunitas yang eksis dan berkembang melalui proses sejarah panjang sebelumnya. Tidak ditemukn jejak sejarah al-Mawali Turki sebagai entitas etnis atau bangsa yang berkembang dan berperan secara historis sebelum pemerintahan Daulah Abbasiyah periode kedua. Pada masa awal Daulah Abbasiyah atau pra pendiriannya, apalagi pada masa-masa pemerintahan Islam sebelumnya sejak dan pasca kenabian, keterlibatan historis mereka tidak ditemukan dalam sejarah. Faktanya memang demikian. Al-Mawali Turki mulai menjadi kekuatan dalam politik setelah berdirinya pemerintahan Bani Saljuk pada akhir masa klasik dan awal periode pertengahan serta pada masa Daulah Uthmaniyah (Turki Usmani) pada periode pertengahan hingga abad modern. Hal ini berbeda jauh dengan fakta historis al-Mawali Persia yang teleh eksis dan berkembang menyebar-luas dalam pemerintahan dan Daulah Islam sejak masa Daulah Bani Umayyah di Syiria, meskipun posisi dan kedudukan mereka dalam pemerintahan tersebut masih termarjinalkan.

2. Faktor Historis al-Mawali Turki

Sebagai sebuah bangsa, secara historis, Turki tidak memiliki akar historis sebagai sebuah bangsa yang berperadaban pada pra dan awal Islam sebelumnya. Turki bukanah bangsa yang memiliki peradaban tinggi pada masa kuno atau masa sebelum masehi yang dapat dijadikan ciri sebagai bagian dari peradaban dunia. Fakta ini berbeda dengan Persia yang secara historis termasuk bangsa yang berperadaban pada masa kuno sebelum masehi dan jauh sebelum kedatangan Islam di Jazirah Arab pada awal abad ke-7 M. Faktor historis bangsa Turki sebagai sebuah bangsa yang tidak memiliki akar peradaban yang tinggi seperti bangsa Persia ini sangat mempengaruhi terhadap kaum al-Mawali Turki yang direkrut untuk bekerja-sama dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah periode kedua sebagai elite politik istana pembantu utama khalifah yang berkuasa. Namun, peran-peran poltik mereka tidak signifikan dalam memajukan pemerintahan daulah tersebut. Sebaliknya peran-peran yang dimainkan mereka lebih pada upaya pelemahan istana daulah melalui konspirasi dan rekayasa pembunuhan terhadap para khalifah yang berkuasa. Kasus- kasus pembunuhan yang terjadi pada Khalifah al-Mutawakkil, Khalifah al-Musta’in.

**PENUTUP**

Sebagian **p**eriodisasi Daulah Abbasiyah, berdasarkan kemajuan dan kemundurannya dapat dikategorikan kepada dua periode. Periode pertama berlangsung sejak masa Khalifah as-Saffah hingga masa Khalifah al-Mutawakkil, berlangsung selama satu abad lebih(132 – 247 H./750 – 861 M.). Periode ini merupakan periode dominasi al-Mawali Persia dalam pemerintahan daulah tersebut yang ditandai oleh kemajuan-kemajuan yang dicapainya, baik dalam kebudayaan, khususnya ilmu pengetahuan maupun politik. Kemauan dalam ilmu pengetahuan tampak dengan perkembangan gerakan penerjemahan pelbagai ilmu pengetahuan berbahasa asing ke dalam bahasa Arab, penyusunan dan pembukuan pelbagai ilmu pengetahuan dan munculnya pelbagai karya para ilmuwan (ulama), baik dalam ilmu-ilmu keagamaan, maupun ilmu pengetahuan umum. Sedangkan dalam politik kemajuan pada periode pertama ini ditandai oleh stabilitas politik, terutama sejak khalifah al-Mansur berkuasa, dapat diredamnya pelbagai gerakan pemberontakan, seperti pemberontakan Khawarij dan Syi’ah, adanya hubungan luar negeri yang intens, dan stabilitas ekonomi, hingga mencapai puncaknya masa Khalifah Harun al-Rasyid dan Khalifah al-Ma’mun. Karena pelbagai kemajuan ini masa pemerintahan daulah Abbasiyah periode pertama sering disebut sebagai era *golden age*, yaitu masa keemasan Islam, ditandai oleh pelbagai pencapaian dalam ilmu pengetahuan dan stabilitas politik.

Sebaliknya, Daulah Abbasiyah periode kedua, yang berlangsung hampir dua abad juga (247 – 334 H./944 – 954 M.), merupakan periode dominasi al-Mawali Turki dalam daulah tersebut, yang ditandai oleh kemunduran baik dalam politik pemerintahan maupun dalam kebudayaan, khususnya pemikiran Islam. Dalam politik dan pemerintahan kemunduran ini ditandai oleh konflik internal para khalifah dalam istana Daulah Abbasiyah, banyaknya pembunuhan terhadap para khalifah Daulah Abbasiyah oleh elite al-Mawali Turki, baik melalui rekayasa maupun konspirasi dengan khalifah atau putra mahkota, dikendalikannya istana Daulah Abbasiyah oleh al-Mawali Turki yang duduk dalam birokrasi pemerintahan, dan banyaknya wilayah provinsi yang memisahkan diri pusat (Baghdad), sehingga kepemimpinan khalifah hanya simbolik dan kekuasaan wilayah semakin terbatas di wilayah Iraq saja.

Dalam bidang kebudayaan, khususnya pemikiran, kemunduran ini tampak dari pergantian ideologi negara dari Mu’tazilah kepada Sunni. Imlikasinya corak pemikiran Mu’tazilah bercirikan menggunakan landasan filosofis, *free will* rasional dan digantikan dengan corak pemikiran Sunni yang cenderung fatalis, dan corak pemikiran tradisionalis model Hanbali yang tekstualis, sehingga kajian-kajian kefilsafatan dan polemik pemikiran tidak lagi berkembang.

Peran-peran sosial-politik dan sosial kebudayaan al-Mawali Persia dalam Daulah Abbasiyah periode pertama sangat dominan, sehingga peran mereka memiliki relevansi yang sigifikan terhadap kemajuan tersebut. Peran sosial politik kaum al-Mawali Persia terhadap kemajuan Daulah Abbasiyah periode pertama terletak pada kontribusinya sebagai elite pemerintahan, baik sebagai perdana menteri, tentara (militer), maupun diwan (departemen) terhadap stabilitas politik pemerintahan dan berperannya sistem pemerintahan Abbasiyah. Demikian juga peran sosial-budaya al-Mawali Persia tampak dari banyaknya para penulis, baik sebagai ilmuwan maupun sastrawan, karya-karya ilmu pengetahuan dan terjemahan dari bahasa Persia ke dalam bahasa Arab.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Daulah Abbasiyah periode pertama yang dikendalikan al-Mawali Turki ini mengalami kemajuan. Pertama, faktor keterlibatan dan peran mereka sejak pra berdirinya Daulah Abbasiyah, yaitu keterlibatan mereka dalam pemberontakan (rovolusi) keluarga Abbasiyah (Hasyimiyah) dalam upaya melemahkan dan menghancurkan Daulah Bani Umayyah selama lebih urang 32 tahun. Faktor ini membentuk kaitan terhadap munculnya kesatuan/kebersamaan Arab-Persia di tingkat elite struktur kekuasaan, kesadaran kolektif dan rasa memiliki terhadap Daulah Abbasiyah, sehingga sistem yang ada dalam pemerintahan dan kebijakan-kebijakannya dapat berjalan secara signifikan. Kedua adalah faktor historis Persia sebagai bangsa yang pernah beradaban tinggi dan pernah mengalami kejayaan. Faktor ini memberikan pengalaman positif yng signifikan bagi elite al-Mawali Persia dalam menjalankan roda pemerintahan Daulah Abbasiyah. Di sisi lain, para khalifah Abbasiyah juga banyak mengadopsi sistem pemerintahan, dan kebudayaan Persia, seperti dalam sistem al-wazir (perdana menteri), diwan-diwan dalam pemerintahan hingga pola bangunan istana Dar as-Salam Baghdad, mengikuti pola dan desain bangunan Kerajaan Persia sebelumnya. Demikian juga pembangunan perpustakaan Baitul Hikmah pada masa Khalifah Harun al-Rasyid, memiliki kaitan dengan kemajuan Kerajaan Persia dalam kebudayaan, yang mana perpustakaan Jundi Shapur sebagai pusatnya. Ketiga adalah faktor geografis. Secara geografis, Baghdad terletak dalam wilayah strategis, terletak di antara dua sungai besar, Sungai Euprat dan Sungai Tigris yang merupakan jalur lalu-lintas laut internasional, sehingga memudahkan hubungan dengan luar dan masuknya banyak bangsa asing (al-ajm) dan al-mawali ke Baghdad. Dalam lingkup lokal, secara geografis Baghdad juga bertetangga dengan Persia yang memiliki kebudayaan dan peradaban tinggi. Bahkan jika ditinjau secara historis, letak geografis Baghdad ini memiliki hubungan erat dengan peradaban kuno tertua dunia, yaitu Mesopotamia, Sumeria dan Babylonia, yang kesemuanya berada di wilayah Iraq. Sehingga secara historis, letak geografis ini merupakan wilayah peradaban dunia.

Berbeda dengan peran al-Mawali Persia dan beberapa faktor kemajuannya di atas, al-Mawali Turki pada periode kedua Daulah Abbasiyah mengalami fakta kebalikannya, yaitu kemunduran dalam politik dan pemikiran dalam aspek kebudayaan. Keterlibatan dan peran al-Mawali Turki dalam periode Daulah Abbasiyah kedua tidak melalui proses sejarah sebelumnya, yang dapat mengikat hubungan emosional, sosial dan politik mereka dalam pemerintahan.

Ketidak-terlibatan al-Mawali Persia dalam proses sejarah pendirian Daulah Abbasiyah menjadi salah-satu faktor tidak adanya hubungan dan ikatan yang memperkuat relasi kuasa di antara al-Mawali Turki dengan para khalifah Abbasiyah. Hal ini juga menyebabkan peran-peran sosial-politik al-Mawali Turki dalam sistem pemerintahan Abbasiyah tidak signifikan. Sebaliknya mereka memainkan peran-peran negatif , seperti dalam konteks rekayasa dan konspirasi politik pembunuhan para khalifah Abbasiyah periode kedua, sehingga melemahkan politik dan pemerintahan daulah tersebut. Posisi ini ke dalam (internal istana daulah) memunculkan banyak konflik perebutan kekuasaan di antara para khalifah dan putra mahkota, sementara ke luar semakin banyaknya wilayah provinsi yang memisahkan diri.

Faktor kedua adalah faktor historis Turki. Sebagai sebuah bangsa, Turki tidak memiliki pengalaman dalam kemajuan peradaban sebelum dan setelah kedatangan Islam, kecuali setalah Daulah Abbasiyah mengalami kejayaannya. Oleh karena itu, dalam mengendalikan pemerintahan daulah Abbasiyah periode kedua, mereka lebih mementingkan aspek militer dan melakukan peran politik perpecahan internal Abbasiyah. Hal ini pada gilirannya berpengaruh juga terhadap perpecahan wialayah provinsi karena hilangnya kekuatan dan legitimasi pemerintahan di dalam istana Daulah Abbasiyah periode kedua.

Beberapa hal di atas menegaskan bahwa struktur sosial al-Mawali Persia dan Turki dalam konteks Daulah Abbasiyah, meskipun sama sama berperan sebagai elite pemerintahan, namun memiliki peran yang berbeda secara kontras disebabkan oleh faktor keterlibatan dan peran historis, faktor sejarah keduanya dan faktor geografis menjadi penentu dalam kemajuan dan kemunduran daulah tersebut. Dalam konteks inilah teori struktur sosial yang dinyatakan oleh Marion Levy memiliki relevansinya.

1. Sejak masa kenabian hingga masa Daulah Bani Umayyah, peran etnis Arab telah mendominasi dalam proses terbentuknya peradaban tersebut. Bahkan pada masa Daulah Bani Umayyah, salah-satu kebijakan yang diterapkan dari sistem pemerintahannya adalah Arabisme. Nurul Hak, *Daulah Bani Umayyah; Rekayasa Sejarah Daulah Islam Bani Umayyah*, (Yogyakarta : Ghosen Publishing, 2012. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibn Qutaibah, *al-Ma’arif*, (ed.) Tarwat ‘Akasah, (Mesir : Dar al-Ma’arif, juz 2), hlm. 29. Ahmad Amin, Fajrul Islam, hlm. 172-179. H.A.R. Gibb, *Mohammedanism, An Historical Survey*, London : Oxford University Press, cet. Ke-2, 1953), hlm. 7. [↑](#footnote-ref-2)
3. al-Zahabi, *Tazkirah al-Khuffaz*, juz ke-1, hlm. 151. [↑](#footnote-ref-3)
4. Cemil Akdogan, *Science in Islam& The West,* Kuala Lumpur : IIUM, 2008, hlm.64. [↑](#footnote-ref-4)
5. Keterlibatan etnis Persia telah dimulai sejak sebelum daulah ini berdiri, yaitu sejak digalakkannya propaganda anti Daulah Bani Umayyah dan diberlakukannya gerakan latin dan pemberontakan yang dimotori oleh keluarga al-Abbas dari Bani Hasyim, Syi’ah dan kelompok etnis Persia dari Khurasan yang beraliansi membangun kekuatan untuk meruntuhkan Daulah Bani Umayyah dan mendirikan Daulah Abbasiyah di Baghdad, Iraq.

   Gerakan aliansi ini berawal sejak tahun 102 H./721 M. [↑](#footnote-ref-5)
6. Sebagaimana dinyatakan oleh al-Mawardi, sistem perdana menteri dalam sistem pemerintahan dan daulah Islam baru terjadi pada masa Daulah Abbasiyah ini. [↑](#footnote-ref-6)
7. Jamaludin Surur, Dr. *Tarikh al-Hadharah al-Islamiyyah fi Sharq*, hlm. 22-23. [↑](#footnote-ref-7)
8. Cemil Akdogan, *Op.Cit.* [↑](#footnote-ref-8)
9. Jumlah seluruh khalifah Daulah Abbasiyah sendiri adalah 37 khalifah, sehingga tidak seluruhkhalifah dan masa Daulah Abbasiyah dibahas dalam penelitian ini. [↑](#footnote-ref-9)
10. Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Tiara Wacana : Yogyakarta, 2003), hlm. 44-45. [↑](#footnote-ref-10)
11. August Comte dianggap sebagai bapak sosiologi modern (Barat), karena usahanya dalam memasukan metode ilmiah (*scientific*) dalam kajian sosiologi, bahkan dia sendiri yang dianggap sebagai pencetus istilah sosiologi untuk ilmu sosial. Ide utamnya berawal dari fungsionalisme yang kemudian dihubungkan dengan organisme biologis, sehingga struktur dan fungsi sosial berkaitan erat dengan biologis atau organisme individu demikian juga sebaliknya. Sebagaimana Comte, Spencer juga mengaitkan secara erat antara sosiologi dengan aspek bilogis dan organisme. Dalam penjelasannya Spencer membagi dua analogi dalam sosiologi; analogi statis dan analogi dinamis. Yang pertama lebih berkaitan dengan organisme individual, sedangkan yang kedua berkaitan dengan organisme sosial. Sementara Durkheime memandang masyarakat sebagai suatu kesatuan sistem, yang masing-masing memiliki fungsi atau peran utama di dalamnya. Lihat selengkapnya, Jonathan H. Turner, *The Structure of Sociological Theory*, Revised edition, (Illionis : The Dorsey Press), hlm. 21-25. [↑](#footnote-ref-11)
12. David kavlan, *Teori Budaya*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 149. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid.,* hlm. 150. [↑](#footnote-ref-13)
14. Kekuasaan Suku Quraisy terhadap Ka’bah dan kota Mekkah telah diawali semenjak Qushay menguasai Ka’bah sebagai pusat peribadatan suku-suku Arab. [↑](#footnote-ref-14)
15. al-Tabari, *Tarikh al-Tabari : Tarikh ar-Rusul wa al-Muluk*, ed. Muhammad Abu al-Fadl,(Mesir : Dar al-Ma’arif), juz 2, hlm.252. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid.*, juz 7, hlm 421. Khabar Nubuwah mengenai kekhilafahan ini tidak hanya diterima oleh Abbas Bin Abdul Mutalib dan diketahui oleh sanak keturunannya, tetapi juga oleh kekhalifahan sebelumnya : Bani Umayyah. Rasulullah s.a.w. pernah berwaiat kepada Mu’awiyah agar menjadi seorang raja (khalifah) yang baik dan bijaksana, jika kelak dia menjadi raja (khalifah). Semenjak saat itu pula Mu’awiyah Bin Abu Sufyan mengharap-harapkan kekhalifahan tersebut. Lihat as-Suyuti, Tarikh al-Khulafa, hlm. [↑](#footnote-ref-16)
17. Sebagaimana dinyatakan oleh Bernard Lewis bahwa keberhasilan suksesi dari Daulah bani Umayyah ke Abbasiyah merupakan suatu koalisi. Namun demikian, dengan beragam dan percampuran etnis dan kebangsaan, sulit untuk diterima bahwa proses suksesi ini merupakan pertarungan dan konflik rasial antara Arab, yang direpresentasikan oleh Daulah Bani Umayyah, dengan Persia, yang direpresentasikan oleh para pendukung Abbasiyah dari Persia dan Khurasan seperti yang dinyatakan Bernard Lewis. Karena sebagian dari pendukung Abbasiyah juga dari kalangan bangsa Arab, termasuk kelompok Shi’ah dan Ahl al-Bait, termasuk keluarga Abbas sendiri. Mengenai pendapatnya yag sulit untuk diterima lihat Bernard Lewis, The Arabs in History, United State : Oxford University Press, 1993, hlm.85. [↑](#footnote-ref-17)
18. Muhammad Abdul Fattah Ilyan, *Qiyam al-Daulah al-Abbasiyah wa tafasir al-Jadid fi Mu’azaratiha*, hlm.63. [↑](#footnote-ref-18)
19. Hadith ini diriwayatkan oleh al-Tabari, yang menyebutkan bahwa Rasulullah s.a.w. pernah memberitahukan al-Abbas bahwa putranya (keturunannya) kelak akan meneruskan estapeta kekhilafahan, sehingga sejak saat itu putranya senantiasa mengharapkannya. Dalam hadithlain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sa’id al-Khudri menyatakan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, “Akan datang seseorang dari Ahli Baitku pada penggalan zaman seseorang yang disebut as-Saffah. Al-Suyuthi, ***Tarikh al-Kulafa***, hlm. 256. [↑](#footnote-ref-19)
20. [↑](#footnote-ref-20)
21. As’ad Thaliq, Turath al-Khulafa al-Rasyidin, hlm.11. [↑](#footnote-ref-21)
22. Sistem pepemrintahan daulah dalam Islam pada hakikatnya merupakan sistem kerajaan yang masih mempertahankan spirit keagamaan model khalifah namun telah berganti dengan cara turun-temurun. Hal ini sesuai dengan hadith Nabi mengenai tiga tipe kepemimpinan ; kenabian, khilafah dan kerajaan. Kenabian berlaku pada masa Nabi Muhammad s.a.w. di Madinah sebagai pemimpin negara Madinah selama 10 tahun. Sistem khilafah berlangsung selama 30 tahun oleh empat sahabat nabi utama, al-Khulafa al-Rashidun; Abu Bakar as-Siddiq r.a., Umar Bin Khattab r.a., Uthman Bin Affan r.a., dan Ali Bin Abu Talib k.w. Sedangkan sistem kerajaan bermula semenjak masa Daulah Bani Umayyah memerintah di Syria hingga masa Daulah Uthmaniyah (Kerajaan Turki Uthmani) di Turki, sebagai akhir dari sistem daulah Islam. Mengenai ketiga sistem ini lihat misalnya as-Suyuti, *Tarikh al-Khulafa* [↑](#footnote-ref-22)
23. Bernard Lewis, *The Arabs in History,* (London : University Press), hlm. 84. [↑](#footnote-ref-23)
24. al-Mawardi dalam karya al-Ahkam as-Sulthaniyah menngelompokkan al-wazir ke dalam dua kategori, yaitu wazir al-tanfidz dan wazir al-tafwid. [↑](#footnote-ref-24)
25. Munir al-‘Iljani, ‘*Abqariyah al-Islam fi ‘Ushur al-Hukm*, Dar al-Nafais, hlm. 166. [↑](#footnote-ref-25)
26. Bernard Lewis, *The Arabs History,* (London : Oxford University Press, 1947), hlm. 89. [↑](#footnote-ref-26)
27. Al-Mawali Turki yang direkrut oleh al-Mu’tashim berasal dari beberapa wilayah, termasuk dari pasar-pasar budak belian (hamba sahaya). [↑](#footnote-ref-27)
28. Ibrahim Hasan, Dr., *al-Tarikh al-Islami al-‘Am,* (Mesir : Maktabah Nahdhah, t.t.), hlm. 414. [↑](#footnote-ref-28)
29. As-Suyuti, Tarikh al-Khulafa, hlm. 336. Ahmad al-Usairy, Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX, (Jakarta : Akbar Media, cet.ke-9, 2011), hlm. 249. [↑](#footnote-ref-29)
30. Hasan Ibrahim Hasan&Ali Ibrahim Hasan, al-Nidham al-Islamiyyah, (Mesir : Maktabah Nahdhah al-Mishriyyah), hlm.182. [↑](#footnote-ref-30)
31. Ibid., hlm. 336. [↑](#footnote-ref-31)
32. Al-Tabari, *Tarikh al-Tabari,Tarikh al-Rusul wa al-Muluk*, juz 9, hlm. 18. [↑](#footnote-ref-32)
33. As-Suyuthi, *Tarikh al-Khulafa*, hlm. 261. [↑](#footnote-ref-33)
34. Ahmad Amin, *Fajr al-Islam,* hlm. 172-179. [↑](#footnote-ref-34)
35. Ibn Qutaibah, *al-Ma’arif*, (ed)., Tarwat ‘Akasyah, Mesir: Dar al-Ma’arif, juz 2, hlm. 29. [↑](#footnote-ref-35)
36. Di antara tokoh orientalis lain yang menyatakan hal yang sama mengenai majunya ilmu pengtahuan pada masa periode ini adalah Bernard Lewis, Phillip K. Hitti, Montgommery Watt dan Bosworth. Bahkan menurut orientalis yang terakhir kemajuan pada masa ini terjadi dalam berbagai bidang. Tidak hanya ilmu pengetahuan tetapi juga politik dan ekonomi. Lihat C.E. Bosworth, *Dinasti-Dinasti Islam*, terj. Ilyas hasan, (Bandung : Mizan, 1993), hlm. 30. [↑](#footnote-ref-36)
37. D.S. Margoliouth, *Lectures on Arabic Historians*, (Delli : Idarah Adabiyat, 2009), hlm. 92, 100. [↑](#footnote-ref-37)
38. Hamilton Alexander Rossken (H.A.R.) Gibb, *Mohammedanism : An Historical Survey*, (London : Oxford University Press, cet. ke-2, 1953), hlm. 7. [↑](#footnote-ref-38)
39. as-Suyuthi, *Tarikh al-Khulafa*, hlm. 271. [↑](#footnote-ref-39)
40. Dimitri Gutas, *Greek Thought, ‘Arabic Culture:The Graeco-’Arabic Translation Movement in Baghdad and Early Abbasid Society (2nd – 4th /8th – 10th centuries*), London & New York: Routledge, 1998, hlm. 83. [↑](#footnote-ref-40)
41. Al-Jahid, *al-Bayan wa al-Tabyin*, juz 3, hlm. 206. Al-Mas’udi, *Muruj al-Dahab wa Ma’adin al-Jauhar*, juz 2, hlm. 190. [↑](#footnote-ref-41)
42. Perbedaan lain antara sistem politik Daulah Bani Umayyah dengan Daulah Abbasiyah di antaranya adalah pengadopsian sistem kerajaan. Daulah Bani Umayyah lebih cenderung mengadopsi sistem Kekaisaran (Kerajaan) Romawi, sedangkan Daulah Abbasiyah lebih mengadopsi sistem Kisra (Kerajaan) Persia. Kedua hal ini lebih disebabkan oleh faktor kedekatan geografis. Syria yang menjadi pusat Kerajaan Daulah bani Umayyah secara geografis bertetangga dengan Kerajaan Bizantiyum, Romawi Timur, sedangkan Daulah Abbasiyah bertetangga dengan Kekisraan (Kerajaan Persia). Hal lain yang membedakan adalah sistem al-wazir (perdana menteri), yang menjadi pelaksana harian pemerintahan pada masa Daulah Abbasiyah, sedangkan pada masa Daulah Abbasiyah hal tersebut dipegang oleh seorang al-katib (sekretaris kerajaan). [↑](#footnote-ref-42)
43. Al-Khatib al-Baghdadi, Tarikh Baghdad, juz 1, hlm 14. [↑](#footnote-ref-43)
44. Muhammad Kurdi Ali, *al-Islam wa al-Hadharah al-Arabiyah*, juz ke-2, hlm.199. [↑](#footnote-ref-44)
45. Ahmad Amin, *Duha al-Islam*, juz 1, hlm. 42. [↑](#footnote-ref-45)
46. Lihat kembali penjelasan mengenai hal ini dalam pembahasan sebelumnya di atas. [↑](#footnote-ref-46)
47. M.A. Shaban, *The Abbasid Revolution*, (London : Cambridge University Press, 1970), hlm. 156. [↑](#footnote-ref-47)
48. Sebenarnya dalam konteks ilmu pengetahuan, peran al-Mawali Persia tidak hanya pada periode pertama Daulah Abbasiyah, tetapi juga pada periode kedua, ketika Daulah Abbasiyah pada periode kedua melemah dan mundur dari sisi politik, tetapi berkembang dan cenderung maju dalam ilmu pengetahuan. [↑](#footnote-ref-48)
49. Mehdi Nakosten, Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat : Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam, (Surabaya : Risalah Gusti, 2003), hlm. 36. [↑](#footnote-ref-49)
50. *Ibid*., hlm. 37. [↑](#footnote-ref-50)
51. *Ibid.*, hlm. 38. Al-Baladuri menerjemahkan karya mengenai Nasehat Ardeshir, Tamimi menerjemahkan buku Zick al-Shahriyavi, al-Farrukhan menerjemahkan kitab al-Mahasin.Selain Abdullah Ibnu Muqaffa, tokoh sejarawan Persia adalah Abu Ubaidah (w.210 H./826 M.). Dia sebenarnya bukan sekedar seorang sejarawan, tetapi juga seorang ilmuwan sangat alim mengenai ilmu-ilmu keislaman, bangsa ‘Arab dan Persia, termasuk dalam bahasa dan masyarakat ‘Arab, baik masa Jahiliyah maupun setelah kedatangan Islam. Ini dibuktikan oleh tulisan-tulisannya yang berhubungan dengan keagamaan Islam, masyarakat ‘Arab, *diwan al-’Arab*, sehingga al-Dahabi mengakuinya sebagai seseorang pengarang besar. Bahkan al-Jahid menyatakan Abu ‘Ubaidah adalah seorang maula yang paling pandai tentang pelbagai ilmu. Abu Ubaidah juga memiliki banyak karya sama ada karya-karya tentang ilmu-ilmu al-Qur’an, Hadith Nabi s.a.w., bahasa, sastera dan masyarakat ‘Arab, ataupun tentang sejarah Islam klasik dan sejarah Parsi. [↑](#footnote-ref-51)
52. Karya beliau dalam bidang tafsir ini berjudul Tafsir Ay Ayah al-Qur’an [↑](#footnote-ref-52)
53. Ali Ibrahim Hasan, Dr. Al-Tarikh al-Islami al-‘Am..., hlm.426. [↑](#footnote-ref-53)
54. Disebutkan dalam berbagai sumber bahwa elite al-Mawali Turki membayar Ibn Thoifur, dokter pribadi Khalifah al-Mustanshir, sebesar 30 ribu dinar untuk membunuhnya. Kemudian dokter pribadinya membunuhnya dengan cara meracunnya hingga Khalifah al-Mutawakkil wafat. Ide dan rekayasa meracun ini didasarkan pada ketidaksenangan Khalifah al-Muntashir setelah ayahnya Khalifah al-utawakkil terbunuh, yang kemudian disebar-luaskan di lingkungan istana bahwa para pembunuh ayahnya adalah para elite al-Mawali Turki di lingkungan istananya. [↑](#footnote-ref-54)
55. Pembunuhan terhadap Khalifah al-Musta’in juga tidak lepas dari otak rekayasa dan konspirasi pembunuhannya antara elite Mawali Turki, Khalifah al-Mu’taz dan Ibn Thulun. Yang terakhir kemudian mengutus Sa’id pembantunya untuk membunuhnya. Sa’id kemudian berangkat dengan tentaranya ke al-Wasith, tempat pengasingan Khalifah al-Musta’in, dan di wilayah itu Sa’id membunuh Khalifah al-Musta’in. [↑](#footnote-ref-55)
56. Syafiq Ibrahim Abu Abu Khair, *al-Harakat as-Siyasiyah walmazhabiyah fi al-Khalij al-‘Arabi min Muntshif al-Qarn l-Thalith ila Nihayah al-Qarni ar-Rabi*, Tesis Cairo University, Jurusan Sejarah dan Peradaban, hlm. 21 [↑](#footnote-ref-56)
57. Muh. Al-Khudri, *Tarikh al-Umam al-Islamiyah*, al-Daulah al-Arabiyah, cet. ke-5, hlm.501. [↑](#footnote-ref-57)
58. Al-Tabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, juz 2, hlm.63-64. [↑](#footnote-ref-58)
59. Di antara kerajaan-kerajaan yang memisahkan diri pada periode kedua Daulah Abbasiyah adalah Daulah Bani Umayyah 2 di Andalusia Spanyol, Daulah Bani Midrar, Sajalmasah, Maghrib, Rustumiyah (Daulah Fatimiyah, Cairo, mesir, Daulah adarisah dan Daulah dan Daulah Aghlabiyah. [↑](#footnote-ref-59)
60. Seperti telah disebutkan di atas, jumlah mereka yang ikut dalam barisan Abu Muslim al-Khurassani di Merve saja mencapai 7.000 orang, belum jumlah mereka dalam barisan di Iraq. [↑](#footnote-ref-60)
61. Hadith-hadith Nabi Muhammad SAW. yang membicarakan masalah ini sangat banyak sekali. As-Suyuti membahasnya dalam suatu fasal tersendiri berjudul, “Hadith-Hadith yang Memberikan Kabar Gembira Mengenai Kekhilafahan Bani Abbas.” Lihat selengkapnya as-Suyuthi, Tarikh al-Khulafa, hlm. 13-19. Di atara hadith tersebut adalah bahwa Umm Fadhl, isteri al-Abbas bertemu dengan Nabi Muhammad SAW., lalu beliu bersabda, “Sesungguhnya engkau tengah hamil seorang anak laki-laki, maka jika engkau telah melahirkan bawalah anak itu kepadaku. Kemudian setelah Ummu fadhl melahirkan, dia datang menemui Nabi Muhammad SAW. Nabi kemudian mengumandangkan adan pada telinga kanannya dan iqamat pada telinga kirinya, lalu beliau mengulaskan lidahnya dan memberikan nama dengan nama Abdullah (Bin Abbas). Kemudian beliau bersabda, pergilah kalian dengan membawa anak ini (sebagai calon) bapaknya para khalifah (Abu al-khulafa). [↑](#footnote-ref-61)
62. Al-Mubarkafuri, *al-Rahiq al-Makhtum*, (Riyad : Dar as-salam li al-Nasyr wa al-Tauzi, 2004), hlm. 28. [↑](#footnote-ref-62)
63. Selain wilayah geografis, suatu peradaban mesti memiliki suatu kota atau masyarakat urban, yang membedakannya dengan masyarakat primitif, dan hidup secara menetap. Lihat selengkapnya.... [↑](#footnote-ref-63)
64. Bernard Lewis, *The Arab in History, Op.Cit.*, hlm. 87-88. [↑](#footnote-ref-64)